

**Determinan Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten/Kota  
Provinsi Nusa Tenggara Timur**

SKRIPSI



Oleh :

Nama : Rif'at Arifur Rochman

Nomor Mahasiswa : 14313269

Jurusan : Ilmu Ekonomi

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2018

**Determinan Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten/Kota**

**Provinsi Nusa Tenggara Timur**

**SKRIPSI**

Disusun dan diajukan untuk memnuhi syarat ujian akhir guna memperoleh gelar

Sarjana jenjang strata 1 Program studi Ilmu Ekonomi, Pada Fakultas Ekonomi

Universitas Islam Indonesia

Oleh :

Nama : Rif'at Arifur Rochman

Nomor Mahasiswa : 14313269

Jurusan : Ilmu Ekonomi

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2018

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain seperti dimaksud dalam buku pedoman penyusunan skripsi Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman atau sanksi apapun sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 28 April 2018

Penulis,



Rif'at Arifur Rochman

## **PENGESAHAN SKRIPSI**

Determinan Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten/Kota

Provinsi Nusa Tenggara Timur

Nama : Rif'at Arifur Rochman

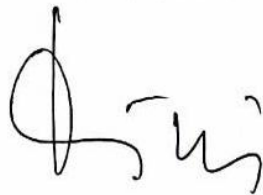
Nomor Mahasiswa : 14313269

Jurusan : Ilmu Ekonomi

Yogyakarta, 14 Mei 2018

Telah disetujui dan disahkan oleh

Dosen pembimbing



Diana Wijayanti, S.E., M.Si.

## BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

DETERMINAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI  
NUSA TENGGARA TIMUR

Disusun Oleh : RIF'AT ARIFUR ROCHMAN

Nomor Mahasiswa : 14313269

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari Selasa, tanggal: 5 Juni 2018

Penguji/ Pembimbing Skripsi : Diana Wijayanti, Dra., M.Si.

Penguji : Andhika Ridha Ayu Perdana, SE., M.Sc.



Handwritten signatures of the examiners, Diana Wijayanti and Andhika Ridha Ayu Perdana, with dotted lines below them.

Mengetahui  
Dekan Fakultas Ekonomi  
Universitas Islam Indonesia



Dr. DL Agus Harjito, M.Si.

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

Kedua orang tua saya Bapak Drs. Abdurokhman dan Ibu Jumaroh S.Ag, dan juga untuk kakak saya Fikri Faisol Rochman dan adik saya Salsa Auliya Rochmah, berkat doa dan dukungan mereka saya bisa menyelesaikan skripsi ini.

Juga untuk Seluruh teman-teman saya, sahabat-sahabat saya, dan teman dekat saya, yang sudah menyemangati saya selama ini.

## **HALAMAN MOTTO**

“Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah SWT yang memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam Kitab yang nyata (Lauh Mahfuzh)”

(Q.S Hud : 6)

## KATA PENGANTAR



*Assallamau'alakum Wr.Wb*

*Alhamdulillahirrabil'alamin*, segala puji bagi Allah SWT atas segala karunia dan nikmat yang diberikan sehingga penulisan skripsi ini dapat di selesaikan dengan baik dan lancar. Serta Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi panutan dan ajaran beliau bagi umatnya sampai sekarang ini.

Penelitian Skripsi ini adalah sebagai tugas akhir untuk menjadapatkan gelar Sarjana Strata S-1 pada jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia. Sehingga dalam menyusun penelitian ini penulis sadar akan masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan, maka segala bentuk saran dan kritik yang positif sangat diharapkan demi menyempurnakan laporan penelitian ini. Dan semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pihak-pihak yang terkait lainnya.

Serta dalam kesempatan ini penulis mengungkapkan rasa terima kasih sebanyak-banyaknya kepada :

1. Allah SWT, berkat Rahmat dan IzinNya yang dilimpahkan, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sampai akhir.
2. Orang tua, Mama dan bapak yang tiada lelah terus mendoakan dan menyemangati sehingga anaknya ini dapat memperoleh gelar Sarjana.



3. Ibu Diana Wijayanti, S.E., M.Si, selaku Dosen Pembimbing skripsi yang memberikan arahan penjelasan dan dukungan sampai skripsi ini terselesaikan.
4. Bapak Dr. Drs. Dwi Praptono Agus Harjito, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Fathul Wahid, ST., M.Sc., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak/Ibu dosen serta para pegawai yang ada di lingkungan Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia.
7. Sahabat-sahabat geng AJJ Squad saya: Faisal, Agus, Tiar, Abdul, Bayu, Iqbal, Nova, dan juga teman dekat saya lainnya, berkat dukungan dan semangat yang mereka semua berikan selama ini terima kasih banyak.
8. Teman-teman Kontrakan Komiza: Ipung, mas Reynaldi, mas Zanuar, Adit, Rizqi, Rifan, Syamsul yang selama ini satu rumah selama di yogya, banyak hal-hal gila yang takkan terlupakan terima kasih kawan.
9. Semua pihak yang telah membantu penulisan dalam menyelesaikan skripsi ini.

*Wassalamu 'alaikum Wr.Wb*

Yogyakarta, 16 Mei 2018  
Penulis

Rif'at Arifur Rochman

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xvi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Manfaat Penelitian .....	5
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI .....</b>	<b>7</b>
2.1 Kajian Pustaka .....	7
2.2 Landasan Teori .....	11
2.2.1 Indeks Pembangunan Manusia .....	11
2.2.2 Pengeluaran Pemerintah bidang Pendidikan .....	16
2.2.3 Pengeluaran Pemerintah bidang Kesehatan .....	16
2.2.4 Kemiskinan .....	17
2.2.5 Belanja Modal .....	19
2.3 kerangka Pemikiran .....	21
2.4 Hubungan antar variabel .....	21
2.4.1 Hubungan Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan terhadap IPM .....	21

2.4.2 Hubungan Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan terhadap IPM	22
2.4.3 Hubungan Kemiskinan terhadap IPM	22
2.4.4 Hubungan Belanja Modal terhadap IPM	23
2.5 Hipotesis Penelitian	23
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	<b>24</b>
3.1 Jenis data dan sumber penelitian	24
3.2 Definisi Operasional Variabel	24
3.2.1 Variabel Dependen	24
3.2.2 Variabel Independen	24
3.3 Metode Analisis	26
3.3.1 <i>Common Effect Model (CEM)</i>	27
3.3.2 <i>Fixed Effect Model (FEM)</i>	27
3.4 Pemilihan Model Regresi	29
3.4.1 Uji Chow Test	29
3.4.2 Uji Hausman Test	30
3.5 Uji Statistik	30
3.5.1 Koefisien Determinasi ( $R^2$ )	30
3.5.2 Uji signifikansi (Uji t)	31
3.5.3 Uji kelayakan model (uji F)	32
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	<b>33</b>
4.1 Deskripsi Data Penelitian	33
4.2 Hasil Uji Regresi Data Panel	35
4.2.1 Common Effect Model	35
4.2.2 Fixed Effect Model	36
4.2.3 Random Effect Model	37
4.3 Pemilihan Model untuk Pengolahan Data	38
4.3.1 Uji Chow Test	38
4.3.2 Uji Hausman Test	39
4.4 Hasil Pengujian Statistik	40
4.4.1 Koefisien Determinasi ( $R^2$ )	42
4.4.2 Uji Kelayakan Model (Uji F)	42

4.4.3 Uji Signifikansi (Uji t) .....	43
4.5 Interpretasi Hasil dan Pembahasan.....	45
4.5.1 Analisis pengaruh Pengeluaran Pemerintah bidang Pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia .....	45
4.5.2 Analisis pengaruh Pengeluaran Pemerintah bidang Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia .....	48
4.5.3 Analisis pengaruh Kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia .....	49
4.5.4 Analisis pengaruh Belanja Modal Pemerintah terhadap Indeks Pembangunan Manusia.....	50
4.6 Koefisien Intersep.....	51
<b>BAB V KESIMPULAN DAN IMPLIKASI .....</b>	<b>53</b>
5.1 Kesimpulan.....	53
5.2 Implikasi .....	53
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>56</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>58</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 IPM Di Provinsi Tenggara Indonesia.....	3
Tabel 1. 2 Jumlah Penduduk Miskin Provinsi NTT.....	4
Tabel 2. 1 Rangkuman Penelitian Terdahulu Dan Jurnal .....	7
Tabel 2. 2 Daftar Komoditas Dalam Perhitungan Paritas Daya Beli .....	14
Tabel 2. 3 Nilai Maksimum Dan Minimum Komponen IPM.....	15
Tabel 4. 1 Statiska Deskripsi.....	34
Tabel 4. 2 Hasil Uji Dengan Common Effect Model.....	35
Tabel 4. 3 Hasil Uji Dengan Fixed Effect Model .....	36
Tabel 4. 4 Hasil Uji Dengan Random Effect Model .....	37
Tabel 4. 5 Hasil Uji Chow Test.....	39
Tabel 4. 6 Hasil Uji Hausman Test .....	40
Tabel 4. 7 Fixed Effect Model .....	41
Tabel 4. 8 Kemampuan Penduduk Laki-Laki Dan Perempuan 10 Tahun Ke Atas Menurut Kemampuan Membaca Dan Menulis Tahun 2015 Dan 2016 .....	46
Tabel 4. 9 Presentase Anak Umur 7-12 Tahun Yang Belum Bersekolah, Masih Bersekolah, Dan Tidak Bersekolah Lagi Tahun 2014-2016.....	47
Tabel 4. 10 Nilai Koefisien Intersep Dan Intersep Sampel.....	51

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 kerangka pemikiran .....	21
--------------------------------------	----

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. 1 Indeks pembangunan manusia kabupaten/kota provinsi NTT (persen).....	58
Lampiran 1. 2 pengeluaran pemerintah bidang pendidikan kabupaten/kota provinsi NTT (Milyar Rupiah) .....	59
Lampiran 1. 3 pengeluaran pemerintah bidang kesehatan kabupaten/kota provinsi NTT (Milyar Rupiah) .....	60
Lampiran 1. 4 Kemiskinan kabupaten/kota provinsi NTT (Ribu Jiwa).....	61
Lampiran 1. 5 Belanja modal kabupaten/kota provinsi NTT (Milyar Rupiah).....	62

## ABSTRAK

Pertumbuhan Ekonomi Nasional suatu negara bisa dilihat dari pembangunan manusia di negara tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini menggunakan variabel pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, pengeluaran pemerintah bidang kesehatan, kemiskinan, dan belanja modal. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK) jenis data *time series* tahun 2011-2016 dan data *cross section* dengan cakupan wilayah 21 kabupaten/kota namun kabupaten Malaka tidak diikutsertakan karena baru terbentuk tahun 2013. Metode penelitian yang digunakan *fixed effect model*. Hasil penelitian menunjukkan pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, pengeluaran pemerintah bidang kesehatan, dan belanja modal berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia, sedangkan kemiskinan tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia.

**Kata Kunci :** *Indeks Pembangunan Manusia, Pengeluaran Pemerintah bidang Pendidikan, Pengeluaran Pemerintah bidang Kesehatan, kemiskinan, Belanja Modal.*



## **ABSTRACT**

National Economic Growth of a country can be seen from human development in the country. This study uses a quantitative approach. This study uses government expenditure variables in education, government spending on health, poverty, and capital expenditure. The data used in this study is secondary data obtained from the Central Bureau of Statistics (BPS) and the Directorate General of Fiscal Balance (DJPK) type of time series data in 2011-2016 and cross section data with 21 districts / municipalities. But, Malaka district is not included because it was formed in 2013. The research method used fixed effect model. The results showed that government education expenditures, government health expenditure and capital expenditure had a significant effect on human development index, while poverty had no effect on human development index.

**Keyword** : *Human Development Index, Government Education Expenditure, Government Health Expenditure, Poverty, Capital Expenditure*

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan merupakan sebuah upaya atau proses untuk melakukan perubahan kearah yang lebih baik. Proses perubahan meliputi berbagai aspek sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Oleh karena itu, pembangunan merupakan syarat mutlak bagi kelangsungan suatu negara. Komponen dasar atau nilai inti keberhasilan pembangunan ekonomi antara lain kecukupan (*sustenance*), jati diri (*self-esteem*) dan kebebasan (*freedom*), yang merupakan tujuan pokok yang harus dicapai oleh setiap masyarakat (Todaro, 2006).

Pembangunan ekonomi adalah hal yang sering dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi dalam hal ini pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan peningkatan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat, sehingga semakin banyak barang dan jasa yang diproduksi maka kesejahteraan masyarakat akan meningkat. Paradigma pembangunan yang sedang berkembang saat ini adalah pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan pembangunan manusia yang dilihat dengan kualitas hidup manusia di tiap-tiap negara.

*United Nations Development Program* (UNDP) pada tahun 1990 memperkenalkan formula *human development index* (HDI) atau dengan istilah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan tiga komponennya yaitu lamanya hidup (angka harapan hidup), tingkat pendidikan (rata-rata lama bersekolah dan angka melek huruf pada usia lima belas tahun keatas), dan tingkat daya beli masyarakat (*purchasing power parity*). Dengan begitu, kesejahteraan masyarakat

dalam memasukan aspek pendidikan dan kesehatan serta kemampuan aspek sandang dan pangan mejadi kesatuan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Indonesia dengan kategori negara yang sedang berkembang terus berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dengan mengupayakan pembangunan ekonomi untuk terwujudnya masyarakat adil dan makmur. Namun untuk terwujudnya masyarakat adil dan makmur apabila dilihat dari laporan pembangunan manusia yang dikeluarkan oleh UNDP tahun 2016, Indonesia menempati urutan 113 dari 188 negara di seluruh dunia, dengan nilai sebesar 0,689 kategori menengah, masih kurang baik dibandingkan dengan negara Malaysia yang menempati urutan 59 dengan nilai 0,789.

Indonesia terbagi menjadi 34 Provinsi yang tersebar di seluruh wilayahnya dengan salah satu provinsi yang ada di Indonesia adalah provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) provinsi yang berada di tenggara Indonesia ini berbatasan langsung dengan negara Timor Leste. NTT merupakan provinsi yang mempunyai banyak pulau total ada 566 pulau besar dan kecil dan mempunyai potensi pariwisata yang sangat banyak, kepala dinas pariwisata dan ekonomi kreatif provinsi NTT marius ardu jelamu mengatakan bahwa awal tahun 2016 hingga juli tercatat sebanyak 14.000 wisatawan mancanegara yang mengunjungi provinsi NTT naik 15 persen dibandingkan jumlah kunjungan pada januari 2015.

Namum apakah dengan berkembangnya pariwisata di NTT dapat mensejahterakan masyarakatnya, bila dilihat dari rekapan indeks pembangunan manusia tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Bada Pusat Statistik (BPS) seluruh

provinsi di Indonesia, provinsi NTT menempati urutan ke 32 dari 34 provinsi di Indonesia, yang artinya belum meratanya tingkat kesejahteraan masyarakat khususnya pembangunan manusianya. Dapat dilihat dari tabel berikut yang mana NTT masih tertinggal dari provinsi di sebelahnya yaitu provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Provinsi Bali.

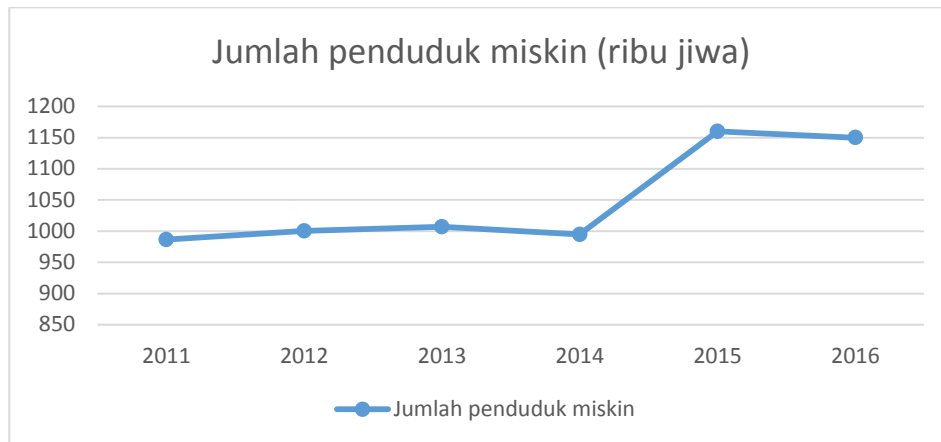
**Tabel 1. 1 IPM di Provinsi Tenggara Indonesia**

Tahun	Provinsi		
	BALI	NTB	NTT
2011	70,87	62,14	60,24
2012	71,62	62,98	60,81
2013	72,09	63,76	61,68
2014	72,48	64,31	62,26
2015	73,27	65,19	62,67
2016	73,65	65,81	63,13

Sumber : BPS

Berdasarkan tabel 1 Indeks Pembangunan Manusia di provinsi tenggara Indonesia yaitu Bali, NTB, dan NTT. Provinsi NTT masih tertinggal dengan rata-rata 61,79 persen yang mana rata-rata provinsi NTB sebesar 64,03 persen disusul provinsi Bali dengan ipm tertinggi dari ketiga provinsi tersebut sebesar 72,33 persen. Ini menunjukkan belum meratanya distribusi untuk pendidikan dan kesehatan yang ada di wilayah provinsi NTT.

Dan juga faktor lain yang dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat yaitu kemiskinan, berikut tabel angka laju kemiskinan dari tahun 2011-2016 di provinsi NTT :

**Tabel 1. 2 Jumlah penduduk miskin provinsi NTT**

Sumber : BPS

Dari tabel diatas menunjukkan angka kenaikan kemiskinan naik pada tahun 2015-2016. Begitu juga yang disampaikan oleh kepala badan pusat statistik provinsi NTT bahwa jumlah penduduk miskin di NTT bertambah 160 orang dalam kurun waktu tujuh bulan. Pada bulan maret 2016 penduduk miskin di NTT 1.149.920 orang atau 22,01 persen menjadi 1.150.080 orang atau 22,19 persen pada September 2016 dari total penduduk 5,3 juta jiwa. Dengan data ini provinsi menempati urutan ketiga provinsi termiskin di Indonesia setelah provinsi Papua dan Papua Barat.

Dengan penjelasan diatas mengenai bagaimana pengaruh pengembangan manusia yang ada di daerah provinsi NTT melalui pendekatan indikator indeks pembangunan manusia (IPM). Maka penulis akan menganalisis dengan mengangkat judul **“Determinan Indeks Pembangunan manusia di Kabupaten/kota Provinsi Nusa Tenggara Timur”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaruh Pengeluaran Pemerintah bidang Pendidikan terhadap IPM di Provinsi NTT
2. Bagaimana pengaruh Pengeluaran Pemerintah bidang Kesehatan terhadap IPM di Provinsi NTT
3. Bagaimana pengaruh Kemiskinan terhadap IPM di Provinsi NTT
4. Bagaimana pengaruh Belanja Modal terhadap IPM di Provinsi NTT

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis pengaruh Pengeluaran Pemerintah bidang Pendidikan terhadap IPM di Provinsi NTT
2. Untuk menganalisis pengaruh Pengeluaran Pemerintah bidang Kesehatan terhadap IPM di Provinsi NTT
3. Untuk menganalisis pengaruh Kemiskinan terhadap IPM di Provinsi NTT
4. Untuk menganalisis pengaruh Belanja Modal terhadap IPM di Provinsi NTT

## **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Untuk Peneliti

Sebagai salah satu syarat mendapat gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia (FE UII), dan juga menambah pengetahuan dan pengalaman penulis agar dapat mengembangkan ilmu yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan di FE UII.

## 2. Untuk Instansi Terkait

Penulis mengadakan penelitian yang diharapkan mampu memberikan informasi dan penambahan wawasan bagi pihak-pihak terkait dengan permasalahan ekonomi, dengan demikian diharapkan dapat menentukan kebijakan dengan tepat.

## 3. Untuk Ilmu pengetahuan

Sebagai bahan bacaan atau referensi maupun penelitian lebih lanjut bagi mahasiswa ataupun pihak lain yang tertarik pada penelitian tentang Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Nusa Tenggara Timur

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

#### 2.1 Kajian Pustaka

Dalam hal ini penulis mengambil beberapa penelitian terdahulu dan jurnal yang mengandung variabel-variabel yang berkaitan dengan penelitian dengan variabel dependen yaitu Indeks Pembangunan Manusia sedangkan untuk Variabel Independen yaitu Pengeluaran Pemerintah bidang Pendidikan dan Kesehatan, Kemiskinan, dan Belanja Modal. Adapun penelitian terdahulu dan jurnal beserta hasilnya sebagai berikut :

**Tabel 2. 1 Rangkuman Penelitian Terdahulu Dan Jurnal**

Nama peneliti dan tahun	Judul Penelitian	Jenis Data	Variabel Yang Digunakan	Hasil
Nadia, istiqomah, et al (2012)	Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia di Indonesia periode 2008-2012	Analisis Regresi berganda dengan menggunakan <i>Fixed Effect Model</i> data panel dari 34 provinsi di Indonesia periode 2008-2012	<b>Variabel Dependen :</b> - IPM  <b>Variabel Independen :</b> - PDRB - Rasio ketergantungan - Konsumsi rumah tangga untuk makanan - APBD untuk pendidikan dan kesehatan	- PDRB dan APBD untuk kesehatan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ipm - Rasio ketergantungan dan konsumsi rumah tangga untuk makanan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM



Denni Sulistio Mirza (2012)	Pengaruh kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan belanja modal terhadap indeks pembangunan manusia di Jawa Tengah tahun 2006-2009	Analisis Regresi berganda dengan menggunakan <i>Fixed Effect Model</i> Data Panel dengan data <i>cross section</i> yaitu 35 kab/kota di Jawa Tengah dan <i>time series</i> periode tahun 2006-2009	<b>Variabel Dependen :</b> - IPM  <b>Variabel Independen :</b> - Kemiskinan - Pertumbuhan Ekonomi - Belanja Modal	- Kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM - Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM - Dan belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM
Muhannad Denny Fajriani (2018)	Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah bidang kesehatan dan pendidikan, PDRB perkapita, dan belanja modal dalam mempengaruhi tingkat IPM di Provinsi Papua	Analisis Regresi berganda dengan menggunakan <i>Fixed Effect Model</i> Data Panel dengan data <i>cross section</i> yaitu kab/kota di Papua dan <i>time series</i> periode tahun 2011-2016	<b>Variabel Dependen :</b> - IPM  <b>Variabel Independen :</b> - Pengeluaran pemerintah bidang pendidikan - Pengeluaran pemerintah bidang kesehatan - PDRB perkapita - Belanja Modal	- Pengeluaran Pemerintah bidang kesehatan dan PDRB perkapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM - Pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan belanja modal berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap IPM
Jodi Julianto	Memodelkan Indeks	Analisis regresi	<b>Variabel Dependen :</b>	- tingkat pengangguran

(2016)	Pembangunan Manusia di Provinsi Lampung	berganda dengan metode OLS ( <i>ordinary least square</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>- IPM</li> </ul> <p><b>Variabel Independen :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- realisasi anggaran sektor pendidikan</li> <li>- realisasi anggaran sektor kesehatan</li> <li>- Tingkat pengangguran terbuka</li> <li>- kemiskinan</li> </ul>	<p>terbuka berpengaruh tidak signifikan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- realisasi anggaran sektor pendidikan berpengaruh positif dan signifikan</li> <li>- realisasi anggaran sektor kesehatan berpengaruh positif dan signifikan</li> <li>- kemiskinan berpengaruh tidak signifikan</li> </ul>
Septian, teguh, et all (2015)	Pengaruh PDRB, Belanja Modal dan kemiskinan terhadap, indeks pembangunan manusia (studi kasus : eks karesidenan besuki)	Analisis regresi data panel dan analisis lintas	<p><b>Variabel Dependen :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- IPM</li> </ul> <p><b>Variabel Independen :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PDRB</li> <li>- Belanja Modal</li> <li>- kemiskinan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- pengaruh pendapatan sektoral dan belanja modal secara regresi berpengaruh signifikan terhadap IPM</li> <li>- kemiskinan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap IPM</li> </ul>
Sugiarto, Abubakar, et all (2013)	Analisis pengaruh Pengeluaran Pemerintah	Analisis Regresi berganda dengan	<p><b>Variabel Dependen :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- IPM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- pengaruh pengeluaran pemerintah sektor</li> </ul>

	kabupaten/kota sektor kesehatan dan pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi aceh	menggunakan Data Panel dengan data <i>cross section</i> yaitu kab/kota di Provinsi Aceh dan <i>time series</i> periode tahun 2006-20011	<b>Variabel Independen :</b> - Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan - Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan	kesehatan berpengaruh signifikan terhadap IPM - pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berpengaruh signifikan terhadap IPM
Merang, et all (2016)	Pengaruh Pengeluaran Pemerintah sektor Pendidikan dan Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di kabupaten Kutai Timur	Analisis Regresi Berganda dengan menggunakan SPSS 22.	<b>Variabel Dependen :</b> - IPM  <b>Variabel Independen :</b> - Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan - Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan	- pengaruh pengeluaran pemerintah sektor Pendidikan berpengaruh signifikan terhadap IPM - pengaruh pengeluaran pemerintah sektor Kesehatan tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM

## **2.2 Landasan Teori**

### **2.2.1 Indeks Pembangunan Manusia**

Indikator kesejahteraan masyarakat sebagai indikator pembangunan ekonomi khususnya pembangunan manusia dan kemiskinan. Indeks pembangunan manusia (IPM) menghitung berdasarkan tiga dimensi yang pertama yaitu dimensi umur, kemudian dimensi manusia terdidik, dan terakhir dimensi standar hidup yang layak. Pada dimensi umur dalam menjalani hidup sehat diukur dengan usia harapan hidup, Selanjutnya dimensi manusia terdidik dapat diukur dengan tingkat kemampuan membaca dan menulis orang dewasa serta lamanya sekolah di sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), dan sekolah menengah atas (SMA), serta dimensi standar hidup yang layak dapat diukur dengan paritas daya beli dan pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan. Dengan demikian, konsep kesejahteraan masyarakat dalam IPM telah memasukkan aspek kesehatan dan pendidikan bersama dengan aspek pangan, sandang, dan perumahan menjadi kesatuan dengan tingkat pendapatan, konsep kesejahteraan masyarakat dalam IPM ini telah memadukan pendekatan kuantitas dan kualitas hidup masyarakat (Todaro dan Stephen C. Smith 2006).

Menurut badan pusat statistik, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. IPM dihitung berdasarkan data yang dapat menggambarkan tiga komponen, yaitu angka harapan hidup yang mengukur keberhasilan dalam bidang kesehatan, angka melek huruf dan rata-rata lamanya bersekolah yang mengukur keberhasilan dalam bidang pendidikan, dan kemampuan daya beli

masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mengukur keberhasilan dalam bidang pembangunan untuk hidup layak.

Berikut adalah komposisi dari tiga dimensi dasar yang membentuk indeks pembangunan manusia:

#### 1. Angka Harapan Hidup

Adalah sebuah perkiraan rata-rata pada tahun yang dapat dicapai seseorang pada usia waktu tertentu selama dia hidup. Dalam perhitungan angka harapan hidup digunakan dua jenis data yaitu Anak Lahir Hidup dan Anak Masih Hidup. Jadi angka harapan hidup ini memperhitungkan bagaimana kesempatan seorang anak untuk tetap hidup sampai waktu usia yang ditempuh selama hidupnya.

Sebagaimana standar yang sudah ditetapkan oleh UNDP dalam menghitung standar angka harapan hidup pada suatu negara. Batas maksimum dan minimum tersebut angka tertinggi yang ditetapkan pada usia 85 tahun, sedangkan pada batas terendah ditetapkan pada usia 25 tahun.

#### 2. Angka Melek Huruf

Yaitu Presentase penduduk usia 15tahun keatas yang dapat membaca dan menulis. Hal ini sesuai dengan standar yang dikeluarkan oleh UNDP bahwa angka melek huruf memiliki batas maksimum 100 dan 0 pada batas minimum. Demikian bahwa masyarakat mampu untuk membaca dan menulis huruf latin dan begitu sebaliknya pada kondisi minimum.

### 3. Rata-Rata Lama Sekolah

Dalam perhitungan IPM menggambarkan seseorang dalam jumlah tahun berusia 15 tahun keatas dalam menjalani pendidikan formal. Untuk rata-rata lama sekolah memiliki standar batas maksimum dan minimum Sesuai UNDP batas atas sebesar 15 tahun dan batas bawah sebesar 0 tahun. Pada usia 15 tahun ini dimana adalah usia yang disesuaikan dengan seseorang lama mengenyam pendidikan formal.

### 4. Paritas Daya Beli

Paritas daya beli ini adalah indikator yang digunakan untuk menggambarkan standar hidup layak. Dalam perhitungan standar hidup layak menggunakan pengeluaran per kapita rill. Selain itu terdapat 27 komoditas kebutuhan pokok yang dimasukkan dalam perhitungan paritas daya beli. Berikut daftar komoditas dalam perhitungan paritas daya beli :

**Tabel 2. 2 Daftar Komoditas Dalam Perhitungan Paritas Daya Beli**

Komoditi		Unit	Sumbangan Terhadap Total Konsumsi (%) <sup>*)</sup>
1.	Beras local	Kg	7.25
2.	Tepung terigu	Kg	0.10
3.	Ketela pohon	Kg	0.22
4.	Ikan tongkol/tuna/cakalang	Kg	0.50
5.	Ikan teri	Ons	0.32
6.	Daging sapi	Kg	0.78
7.	Daging ayam kampung	Kg	0.65
8.	Telur ayam	Butir	1.48
9.	Susu kental manis	397	0.48
10	Bayam	Kg	0.30
11	Kacang panjang	Kg	0.32
12	Kacang tanah	Kg	0.22
13	Tempe	Kg	0.79
14	Jeruk	Kg	0.39
15	Pepaya	Kg	0.18
16	Kelapa	Butir	0.56
17	Gula pasir	Ons	1.61
18	Kopi bubuk	Ons	0.60
19	Garam	Ons	0.15
20	Merica/lada	Ons	0.13
21	Mie instant	80 gram	0.79
22	Rokok kretek/filter	10	2.86
23	Listrik	Kwh	2.06
24	Air minum	M3	0.46
25	Bensin	Liter	1.02
26	Minyak tanah	Liter	1.74
27	Sewa rumah	Unit	11.5
<b>T o t a l</b>			<b>37.52</b>

Sumber : BPS

Sebelum perhitungan IPM komponen harus dihitung indeksinya dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Indeks } X(i,j) = \frac{X(i,j) - X(i-\text{min})}{X(i-\text{maks}) - X(i-\text{min})}$$

Dimana :

$X(i,j)$  = Indeks komponen ke-i dari daerah j

$X(i-\text{min})$  = nilai minimum dari  $X_i$

$X(i\text{-maks}) = \text{nilai maksimum dari } X_i$

Untuk menghitung indeks masing-masing komponen IPM digunakan batas maksimum dan minimum seperti tabel berikut:

**Tabel 2. 3 Nilai Maksimum Dan Minimum Komponen IPM**

Komponen IPM	Maksimum	Minimum	Keterangan
1. Angka Harapan Hidup	85	25	Standar UNDP
2. Angka Melek Huruf	100	0	Standar UNDP
3. Rata-Rata Lama Sekolah	15	0	Standar UNDP
4. Daya Beli	732.720 <sup>a)</sup>	300.000 (1996) 360.000 <sup>b)</sup> 1999,2002	UNDP menggunakan PDB riil disesuaikan

Keterangan : a). Perkiraan maksimum pada akhir PJP II 2018

b). Penyesuaian garis kemiskinan lama dengan garis kemiskinan baru

Sumber : BPS

Rumus yang digunakan dalam menghitung Indeks Pembangunan Manusia adalah sebagai berikut:

$$\text{Indeks Pembangunan Manusia} = \frac{1}{3} (\text{Indeks } X_1 + \text{Indeks } X_2 + \text{Indeks } X_3)$$

Dimana :

$X_1$  : Lamanya Hidup

$$I_{\text{kesehatan}} = \frac{AHH - AHH \text{ min}}{AHH \text{ maks} - AHH \text{ min}}$$

$X_2$  : Tingkat Pendidikan

$$I_{\text{HLS}} = \frac{HLS - HLS \text{ min}}{HLS \text{ maks} - HLS \text{ min}}$$

$$I_{\text{RLS}} = \frac{RLS - RLS \text{ min}}{RLS \text{ maks} - RLS \text{ min}}$$

$$I_{\text{pendidikan}} = \frac{IHLS + IRLS}{2}$$



### X3 : Indeks Pengeluaran

$$I_{\text{pengeluaran}} = \frac{\ln(\text{pengeluaran}) - \ln(\text{pengeluaran})_{\min}}{\ln(\text{pengeluaran})_{\max} - \ln(\text{pengeluaran})_{\min}}$$

#### 2.2.2 Pengeluaran Pemerintah bidang Pendidikan

Dalam dasar hukum dan definisi anggaran pendidikan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tahun anggaran 2017, pasal 1 angka 39 dan 40. Bunyi pasal 39 yaitu yang dimaksud dalam anggaran pendidikan adalah alokasi anggaran pada fungsi pendidikan yang dianggarkan melalui kementerian negara/lembaga, alokasi anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah dan dana desa, dan dana alokasi anggaran pendidikan melalui pembiayaan, termasuk gaji pendidik, tetapi tidak termasuk anggaran pendidikan kedinasan, untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Sedangkan bunyi pasal 40 yaitu presentase anggaran pendidikan adalah perbandingan alokasi anggaran pendidikan terhadap total anggaran belanja negara.

Begitu juga dengan undang undang dasar 1945 amandemen IV pasal 31 ayat 4 yang berbunyi negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang kurangnya 20 persen dari APBN serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggara pendidikan nasional.

#### 2.2.3 Pengeluaran Pemerintah bidang Kesehatan

Dana untuk anggaran kesehatan diatur dalam undang-undang No. 36 tahun 2009 yang menyebutkan bahwa besar anggaran kesehatan pemerintah dialokasikan minimal 5 persen dari APBN di luar gaji, sementara besar anggaran

kesehatan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dialokasikan minimal 10 persen dari APBD di luar gaji, oleh karena itu sudah semestinya pemerintah harus dapat menyediakan pelayanan publik yang menandai dalam rangka peningkatan kualitas pembangunan manusia yang selanjutnya dapat meningkatkan indeks pembangunan manusia.

Dalam melihat mutu manusia dari sisi lain yaitu dari sisi kesehatan dimana kesehatan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi sumber daya manusia, dengan kata lain aspek kesehatan turut mempengaruhi kualitas manusia. Kekurangan kalori, gizi, ataupun rendahnya derajat kesehatan bagi penduduk akan menghasilkan kualitas manusia yang rendah dengan tingkat mental yang terbelakang. Oleh karenanya, diperlukan anggaran khusus untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat melalui pengeluaran pemerintah. (Tjiptoherijanto,1989).

#### **2.2.4 Kemiskinan**

Penyebab kemiskinan adalah pertama Secara mikro, kemiskinan karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah terbatas dan kualitasnya rendah, yang kedua yaitu kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumberdaya manusia yang rendah, berarti produktivitasnya rendah, yang pada gilirannya upahnya rendah. Rendahnya kualitas sumber daya ini karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi, atau karena keturunan, dan ketiga adalah kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal. Ketiga penyebab

kemiskinan ini bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle poverty*) (Kuncoro,1997).

Menurut Todaro pada tahun 1987, pada dasarnya konsep kemiskinan dikaitkan dengan perkiraan tingkat pendapatan dan kebutuhan. Perkiraan kebutuhan hanya dibatasi pada kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar minimum yang memungkinkan seseorang untuk dapat hidup secara laik. Bila pendapatan tidak mencapai kebutuhan minimum, maka orang dapat dikatakan miskin. Dengan demikian, kemiskinan diukur dengan memperbandingkan tingkat pendapatan orang dengan tingkat pendapatan yang dibutuhkan untuk memperoleh kebutuhan dasarnya. Tingkat pendapatan minimum merupakan pembatas antara keadaan miskin dengan tidak miskin atau sering disebut sebagai garis batas kemiskinan. Konsep ini sering disebut dengan kemiskinan absolut.

Menurut Miller pada tahun 1971 orang yang sudah mempunyai pendapatan yang dapat memenuhi kebutuhan dasar minimum tidak selalu berarti tidak miskin. Karenanya ada ahli yang berpendapat bahwa walaupun pendapatan sudah mencapai tingkat kebutuhan dasar minimum, tetapi masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan keadaan masyarakat di sekitarnya, maka orang tersebut masih berada dalam keadaan miskin. Ini terjadi karena kemiskinan lebih banyak ditentukan oleh keadaan sekitarnya, dari pada lingkungan orang yang bersangkutan.

Terminologi kemiskinan lain selain kemiskinan relatif dan kemiskinan absolut adalah kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural. Wignjosoebroto tahun 1995 dalam mendefinisikan kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang

ditengarai atau didalihkan karena faktor kondisi struktur atau tatanan kehidupan yang tak menguntungkan karena tatanan itu tak hanya menyebabkan kemiskinan akan tetapi juga melanggengkan kemiskinan di dalam masyarakat. Kemudian mendefinisikan kemiskinan kultural adalah suatu ketidakberdayaan, Keberdayaan itu sesungguhnya merupakan fungsi kebudayaan. Artinya, berdaya tidaknya seseorang dalam kehidupan bermasyarakat dalam kenyataannya akan banyak ditentukan dan dipengaruhi oleh determinan-determinan sosial-budayanya (seperti posisi, status, dan wawasan yang dipunyainya).

### **2.2.5 Belanja Modal**

Menurut PP No. 45 tahun 2013 belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh atau menambah nilai aset tetap dan aset lainnya. Kemudian menurut peraturan menteri keuangan No.101/PMK.02/2011 tentang klasifikasi anggaran, bahwa anggaran dalam belanja modal hanya bisa digunakan untuk beberapa hal saja antara lain :

#### **1. Belanja modal tanah**

Seluruh pengeluaran untuk pengadaan/pembelian/pembebasan, balik nama, pengosongan, penimbunan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat tanah serta pengeluaran-pengeluaran lain yang bersifat administratif sehubungan dengan perolehan hak dan kewajiban atas tanah pada saat pembebasan/pembayaran ganti rugi tanah tersebut siap digunakan/dipakai.

2. Belanja modal peralatan mesin

Pengeluaran untuk pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

3. Belanja modal gedung dan bangunan

Pengeluaran untuk memperoleh gedung dan bangunan secara kontraktural sampai dengan gedung dan bangunan siap digunakan meliputi biaya pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan izin mendirikan bangunan, notaris, dan pajak (kontraktural).

4. Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan

Pengeluaran untuk memperoleh jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Dalam belanja ini termasuk biaya untuk penambahan dan penggantian yang meningkatkan masa manfaat, menambah nilai aset, dan diatas batas minimal kapitalisasi jalan dan jembatan, irigasi, dan jaringan.

5. Belanja modal lainnya

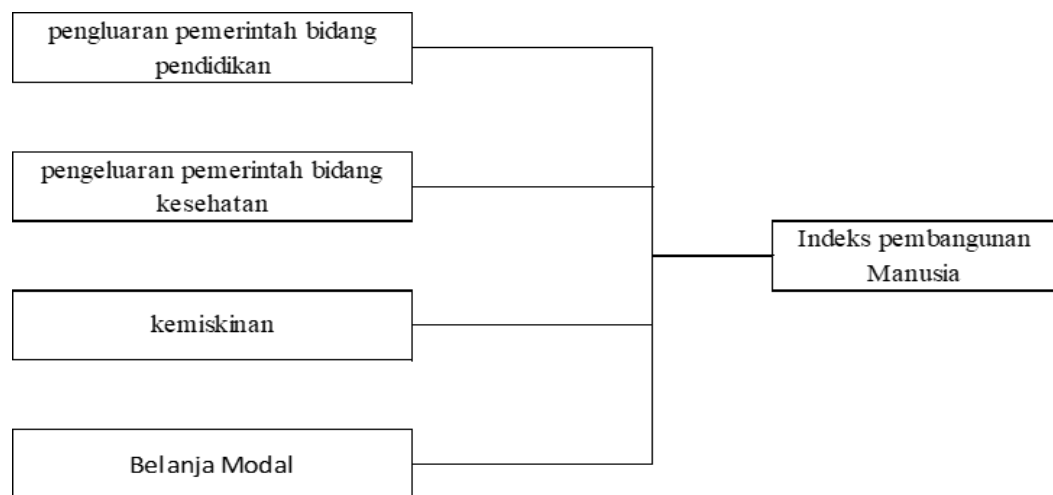
Pengeluaran yang diperlukan dalam kegiatan pembentukan modal untuk pengadaan/pembangunan belanja modal lainnya yang tidak dapat

diklasifikasikan dalam perkiraan kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan (jalan, irigasi dan lain-lain).

#### 6. Belanja modal badan layanan umum (BLU)

Pengeluaran untuk pengadaan/perelohan/pembelian aset yang dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan operasional BLU.

### 2.3 kerangka Pemikiran



Gambar 2. 1 kerangka pemikiran

### 2.4 Hubungan antar variabel

#### 2.4.1 Hubungan Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan terhadap IPM

Pengeluaran pemerintah bidang pendidikan yang sudah tercantumkan dalam Undang-undang dasar 1945 pasal 31 ayat 4 yang telah diamandemen IV. Dengan peraturan yang sah dan legal bahwa masyarakat harus diberikan fasilitas sarana dan prasarana pendidikan yang cukup untuk menunjang mutu kualitas manusianya, sehingga sangat penting untuk pemerintah mengalokasikan dana ke dalam bidang pendidikan.

#### **2.4.2 Hubungan Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan terhadap IPM**

Pengeluaran pemerintah terutama pada sektor kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi hak masyarakat yaitu untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan itu tercantum dalam Undang-undang dasar 1945 pasal 28H ayat 1 juga Undang-undang nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan. Atas demikian bahwa pengeluaran pemerintah bidang kesehatan sangatlah penting untuk meningkatkan sumber daya manusia.

#### **2.4.3 Hubungan Kemiskinan terhadap IPM**

*World Bank* pada tahun 2000 merumuskan indikator kesejahteraan masyarakat sebagai indikator pembangunan ekonomi, khususnya pembangunan manusia dan kemiskinan. Rumusan indikator pembangunan itu disebut sebagai *Millenium Development Goals* (MDGs), yang terdiri dari delapan indikator capaian pembangunan, yaitu penghapusan kemiskinan, pendidikan untuk semua, persamaan gender, perlawanan terhadap penyakit menular, penurunan angka kematian anak, peningkatan kesehatan ibu, pelestarian lingkungan hidup, dan kerjasama global. Keberhasilan pembangunan manusia dapat diukur dalam beberapa dimensi utama. Menurut *World Bank*, tingkat pencapaian pembangunan manusia dapat diamati melalui dimensi pengurangan kemiskinan (*decrease in poverty*), peningkatan kemampuan baca tulis (*increase in literacy*), penurunan tingkat kematian bayi (*decrease in infant mortality*), peningkatan harapan hidup (*life expectancy*) dan penurunan dalam ketimpangan pendapatan (*decrease income inequality*). Dengan pemikiran yang tertera tersebut bahwa pembangunan manusia

dengan mengentaskan kemiskinan dapat meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat.

#### **2.4.4 Hubungan Belanja Modal terhadap IPM**

Menurut Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah belanja modal di daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan jaminan sosial dengan mempertimbangkan analisis standar belanja, standar harga, tolak ukur kinerja dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian belanja modal sangatlah penting untuk menunjang peningkatan sumberdaya manusia dan menjadikan kualitas hidup yang lebih sejahtera.

#### **2.5 Hipotesis Penelitian**

Berdasarkan kajian pustaka dan berbagai penelitian yang telah dilakukan sebelumnya maka didapatkan hipotesis sebagai berikut :

1. Pengeluaran pemerintah bidang pendidikan berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia di NTT.
2. Pengeluaran pemerintah bidang kesehatan berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia di NTT.
3. Kemiskinan berpengaruh negatif terhadap indeks pembangunan manusia di NTT.
4. Belanja Modal berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia di NTT.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis data dan sumber penelitian**

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder. Dimana data sekunder yang didapatkan secara tidak langsung atau dengan media perantara, bisa dengan website resmi pemerintahan. Data–data yang didapatkan yaitu bersumber dari Badan Pusat Staistik (BPS) untuk variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan variabel kemiskinan, selebihnya variabel pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan , serta belanja modal didapatkan dari Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK).

#### **3.2 Definisi Operasional Variabel**

##### **3.2.1 Variabel Dependenden**

Indeks Pembangunan Manusia (Y) digunakan untuk mengukur pembangunan manusia dengan melihat kualitas hidup masyarakat dari tingkat pendidikan, kesehatan, dan tingkat daya beli masyarakat masyarakat dalam mengkonsumsi suatu barang. data yang digunakan yaitu seluruh hasil IPM dari 21 kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat mulai tahun 2011 sampai 2016, dengan ukuran satuan persen (%).

##### **3.2.2 Variabel Independen**

###### **1. Pengeluaran Pemerintah bidang Pendidikan (X1)**

Dalam usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang pendidikan maka pemerintah perlu untuk menganggarkan biaya agar kualitas sumber daya manusia tinggi. yang digunakan yaitu seluruh

data pengeluaran pemerintah bidang pendidikan 20 kabupaten/kota di provinsi Nusa Tenggara Timur mulai dari tahun 2011 sampai 2016, dengan ukuran satuan Milyar Rupiah (Rp)

2. Pengeluaran Pemerintah bidang Kesehatan (X2)

Masyarakat perlu mendapatkan fasilitas kesehatan yang memadai agar dapat menunjang tingkat kesejahteraan masyarakat itu sendiri. yang digunakan yaitu seluruh data pengeluaran pemerintah bidang kesehatan 20 kabupaten/kota di provinsi Nusa Tenggara Timur mulai dari tahun 2011 sampai 2016, dengan ukuran satuan Milyar Rupiah (Rp)

3. Kemiskinan (X3)

Kemiskinan dikhususkan untuk menurangi angka kemiskinan dengan memerhatikan kebutuhan pokok masyarakat agar dapat tercukupi. yang digunakan yaitu seluruh data kemiskinan 20 kabupaten/kota di provinsi Nusa Tenggara Timur mulai dari tahun 2011 sampai 2016, dengan ukuran satuan Ribu Jiwa

4. Belanja Modal (X4)

Dana yang diperuntukan untuk membelanjakan dan melakukan investasi agar dapat meningkatkan penigkatkan roda perkeonomian masyarakat sehingga masyarakat mandapatkan kesejahteraan. yang digunakan yaitu seluruh data belanja modal 20 kabupaten/kota di provinsi Nusa Tenggara Timur mulai dari tahun 2011 sampai 2016, dengan ukuran satuan Milyar Rupiah (Rp)

### 3.3 Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan regresi data panel, dimana data panel adalah gabungan dari data *time series* dan data *cross section*. Analisis data panel dalam penelitian ini memiliki persamaan model sebagai berikut :

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + e_{it}$$

Keterangan :

Y : Indeks Pembangunan Manusia (persen)

X<sub>1</sub> : Pengeluaran Pemerintah bidang Pendidikan (miliar rupiah)

X<sub>2</sub> : Pengeluaran Pemerintah bidang Kesehatan (miliar rupiah)

X<sub>3</sub> : Kemiskinan (ribu jiwa)

X<sub>4</sub> : Belanja Modal (miliar rupiah)

$\beta_0$  : *Intercept*

<sub>i</sub> : Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur

<sub>t</sub> : Periode Waktu

*e* : *Error Term*

Secara Umum Terdapat dua pendekatan yang digunakan dalam menduga model dari data panel yaitu model tanpa pengaruh individu (*common effect*) dan model pengaruh individu (*fixed effect dan random effect*). Berikut penjelasan yang digunakan untuk menganalisis data panel :

### 3.3.1 *Common Effect Model (CEM)*

Pada model CEM ini merupakan model data panel dengan gabungan data time series dengan data cross section. Didalam model CEM ini diasumsikan bahwa perilaku perusahaan sama-sama dalam periode waktu tertentu, apabila setelah menggabungkan cross section dan time series kemudia menggunakan pendekatan *ordinary least square* (OLS) atau teknik kuadrat terkecil untuk mengestimasi model data panel (Sriyana,2014).

### 3.3.2 *Fixed Effect Model (FEM)*

FEM ini adalah suatu regresi yang menunjukkan perbedaan konstanta antar objek, dua asumsi yang ada dalam model regresi adalah :

1. Asumsi konstan tetapi intersep bervariasi antar unit pada suatu hasil regresi sangat mungkin bisa berubah untuk setiap individu dan waktu, pada pendekatan (*fixed effect*) metode dapat dilakukan dengan variabel semu (*dummy*) untuk menjelaskan adanya perbedaan antar intersep. Oleh karena itu model ini dapat diregresi dengan teknik *least square dummy variabel* (LSDV).
2. Asumsi *slope* konstan tetapi intersep bervariasi antar individu/unit dan antar periode waktu, pendekatan dari metode estimasi regresi data panel ini adalah asumsi tentang intersep yang berubah baik antar individu objek analisis maupun antar waktu, tetapi *slope* masih diasumsikan konstan.

### 3.3.3 *Random Effect Model (REM)*

Model ini bisa dikatakan sebagai model *generalized least square (GLS)*, model ini dapat diasumsikan bahwa perbedaan intersep dan konstanta disebabkan residual/error sebagai akibat dari perbedaan unit dan periode waktu yang terjadi secara random. Maka dengan ini REM sering juga disebut model komponen error (*error component model*) (Sriyana,2014).

Ada dua asumsi yang digunakan oleh REM ini yaitu:

1. Intersep dan slope berbeda antar individu, pada asumsi ini intersep dan slope yang di analisis hanya dilihat dari adanya perbedaan antar objek dan antar individu, tetapi adanya perbedaan intersep dan koefisien regresi berdasarkan perubahan waktu masih dikesampingkan.
2. Perubahan intersep slope berbeda dengan antar individu/unit dan periode waktu, pada asumsi ini menjelaskan adanya perbedaan hasil estimasi intersep dan slope yang dianalisis terjadi karena perbedaan antar objek individu analisis sekaligus karena adanya perubahan antar periode waktu.

Adapun persamaan dari MEF adalah sebagai waktu :

Berikut persamaan model *random effect model* :

$$Y_{it} = \alpha + \beta X_{it} + e_{it} \quad e_{it} = U_i + V_t + W_{it}$$

Keterangan :

$V_t$  = Komponen *error time series*

$U_i$  = Komponen *error cross section*

### 3.4 Pemilihan Model Regresi

Dalam hal ini akan dilakukan pemilihan model yang terbaik untuk melakukan analisis, oleh karenanya dilakukan dua cara untuk memilih model mana yang pantas yaitu sebagai berikut :

1. Uji Chow Test adalah pengujian yang dimaksudkan memilih antara *common effect* atau *random effect*.
2. Uji Hausman Test adalah pengujian yang dimaksudkan memilih antara *fixed effect* atau *random effect*.

#### 3.4.1 Uji Chow Test

Dasarnya uji F-statistik merupakan uji perbedaan dua regresi dimana pengujian ini dilakukan untuk memilih antara model *pooled least square* dan *fixed effect*. Dengan uji ini, apakah teknik *fixed effect* lebih baik dari pada model data panel yang tidak mengandung variabel *dummy*, dapat dilihat dari metode residual *sum of squares* (RSS). Terdapat hipotesa dalam pengujian sebagai berikut :

$H_0$  : Memilih model estimasi *common effect*

$H_1$  : Memilih model estimasi *fixed effect*

Hasil dari pengujian apabila menunjukkan bahwa probabilitas *cross section chi square* lebih kecil dari  $\alpha = 1\%$ ,  $5\%$ ,  $10\%$ , maka model yang terpilih adalah *fixed effect* dan begitu juga sebaliknya (Widarjono,2016)

### 3.4.2 Uji Hausman Test

Uji ini merupakan pengujian statistik sebagai dasar pertimbangan untuk memilih antara model *fixed effect* dengan *random effect*. Pertimbangan yang pertama adalah ada tidaknya korelasi antar *error terms* dan variabel independen X. apabila diasumsikan memiliki korelasi antar *error terms* dan variabel independen X maka model *random effect* yang paling tepat, begitu juga sebaliknya. Pertimbangan yang kedua yaitu jika sampel yang diambil hanya bagian kecil dari populasi maka *error terms* yang didapatkan bersifat random sehingga model *random effect* yang lebih baik. Uji ini didasarkan pada ide bahwa LDSV di dalam *fixed effect* dan GLS dimana GLS efisien sedangkan OLS tidak efisien, begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu uji hausman test dapat dilakukan berdasarkan perbedaan estimasi tersebut. Dengan hipotesa sebagai berikut :

$H_0$  : Memilih model estimasi *random effect*

$H_1$  : Memilih model estimasi *fixed effect*

Hasil dari pengujian apabila menunjukkan bahwa probabilitas *croos section* random *chi squre* lebih kecil dari  $\alpha = 1\%$ ,  $5\%$ ,  $10\%$ , maka model yang terpilih adalah *fixed effect* dan begitu juga sebaliknya.

## 3.5 Uji Statistik

### 3.5.1 Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Uji ini dalakukan untuk mengetahui seberapa besar model-model yang digunakan untuk menghitung total presentase bahwa variabel-variabel bebas dapat mempengaruhi variabel terikat. Dengan nili dari koefisien korelasi sendiri dari 0 sampai 1. Apabila nilai  $R^2$  sama dengan 0 maka kemampuan variabel independen

dalam menjelaskan variasi variabel terikat sangat rendah, sebaliknya jika nilai  $R^2$  sama dengan 1 maka dapat menjelaskan variasi variabel sangat tinggi.

### 3.5.2 Uji signifikansi (Uji t)

Uji t ini merupakan pengujian masing-masing variabel independen yang dilakukan untuk mengetahui apakah secara individu variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Dengan membandingkan hasil dari t hitung dengan t tabel, atau dapat juga dengan membandingkan nilai probabilitasnya pada drajat keyakinan tertentu. Dengan hipotesis berikut :

$H_0 : \beta > \alpha$  yang artinya variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

$H_1 : \beta \leq \alpha$  yang artinya variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Jika t hitung  $<$  t tabel, maka  $H_0$  diterima dan menolak  $H_1$  , dalam hal ini variabel independen tidak mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. Begitu sebaliknya jika t hitung  $>$  t tabel maka menolak  $H_0$  dan  $H_1$  diterima, dalam artian variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen secara signifikan. Sedangkan dengan menggunakan probabilitas missal pada drajat keyakinan 5%, apabila nilai probabilitas  $<$  0,05, maka variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen, naum jika nilai probabilitas  $>$  0,05 maka tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.



### 3.5.3 Uji kelayakan model (uji F)

Uji ini dengan metode OLS maka menggunakan uji F dimana untuk mengetahui apakah semua variabel independen berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Dengan hipotesis :

$H_0 : \beta > \alpha$  yang artinya variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

$H_1 : \beta \leq \alpha$  yang artinya variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Jika  $F_{hitung} < F_{tabel}$  artinya  $H_0$  diterima dan menolak  $H_1$  , dalam hal ini variabel independen tidak mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. Begitu sebaliknya jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$  maka menolak  $H_0$  dan  $H_1$  diterima, dalam artian variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen secara signifikan. Sedangkan dengan menggunakan probabilitas missal pada drajat keyakinan 5%, apabila nilai probabilitas  $< 0,05$ , maka variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen, naum jika nilai probabilitas  $> 0,05$  maka tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini akan menjelaskan hasil penelitian dan juga pembahasan dari data-data yang telah diolah dengan menggunakan eviews 9.

#### **4.1 Deskripsi Data Penelitian**

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan data sekunder yang dialihkan dalam bentuk panel yang didapatkan dari Badan Pusat Statistik. Jenis data yang digunakan yaitu data panel gabungan dari data *time series* tahun 2011-2016 dan data *cross section* terhadap 21 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Namun, ada satu kabupaten yang tidak diikut sertakan ke dalam penelitian yaitu Kabupaten Malaka, Dikarenakan kabupaten tersebut baru terbentuk pada tahun 2013.

Penulis melakukan penelitian ini untuk menganalisis berapa besar pengaruh antar variable dependen dengan variable independen yaitu variabel dependen adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan variabel independen yang terdiri dari Pengeluaran Pemerintah bidang Kesehatan, Pengeluaran Pemerintah bidang Pendidikan, Kemiskinan, dan Belanja Modal Pemerintah. Berikut hasil deskripsi dari data variable penelitian :

**Tabel 4. 1 Statiska Deskripsi**

	IPM	PP	PK	KEMISKINAN	BM
Mean	6.007.920	64408.36	187113.9	4.922.584	146592.1
Median	6.004.000	61454.00	188489.0	3.973.000	139093.0
Maximum	7.814.000	173357.0	412063.0	1.440.100	452168.0
Minimum	5.800.000	2.423.000	3.086.000	1.603.000	1.780.000
Std. Dev.	7.189.892	34373.41	102491.5	2.737.926	70580.67
Skewness	-4.004.379	0.552038	0.130111	1.282.150	0.779558
Kurtosis	3.984.698	3.103.766	2.401.139	4.645.825	5.316.568
Jarque-Bera	7.405.419	6.404.955	2.220.575	4.835.611	4.061.109
Probability	0.000000	0.040661	0.329464	0.000000	0.000000
Sum	750990.0	8051045.	23389236	6.153.230	18324018
Sum Sq. Dev.	64101243	1.47E+11	1.30E+12	92953.33	6.18E+11
Observations	126	126	126	126	126

Sumber : Eviews 9, diolah

Analisis statistik deskriptif pada tabel 4.1 menunjukkan jumlah observasi sebanyak 126 dari 21 kabupaten/kota tidak termasuk kabupaten malaka, selama periode tahun 2011-2016. Selama periode diperoleh rata-rata IPM sebesar 6.007.920, dari tingkat IPM tertinggi yaitu Kota Kupang pada tahun 2016 dengan nilai 78,14%, dan IPM terendah yaitu kabupaten Sabu Raijua dengan nilai 54,16% pada tahun yang sama.

Kemudian variabel Pengeluaran Pemerintah bidang Pendidikan dengan rata-rata 64408.36, dengan pengeluaran paling banyak terdapat di kabupaten sumba barat daya sebesar 148,982 milyar rupiah pada tahun 2015. Kemudian pengeluaran pemerintah bidang Kesehatan dengan rata-rata 187113.9 milyar rupiah, dan pengeluaran tertinggi yaitu Kota Kupang sebesar 409,072 milyar rupiah pada tahun 2015.

Dari tabel 4.1 juga variabel kemiskinan menunjukkan tingkat rata-rata kemiskinan sebesar 4.922.584 ribu jiwa. Dengan angka kemiskinan tertinggi yaitu di kabupaten timor tengah selatan sebesar 144,01 ribu jiwa pada tahun 2015, sedangkan untuk angka kemiskinan terendah yaitu kabupaten ngada dengan angka 19,85 ribu jiwa pada tahun 2015. Selanjutnya untuk belanja modal pemerintah dengan rata-rata sebesar 146592.1 milyar rupiah, dengan belanja modal tertinggi yaitu pada 343,094 milyar rupiah untuk kabupaten Ende pada tahun 2016.

## 4.2 Hasil Uji Regresi Data Panel

### 4.2.1 Common Effect Model

Hasil yang didapatkan dari uji regresi dengan menggunakan data panel dengan metode *Common Effect Model* adalah :

**Tabel 4. 2 Hasil uji dengan Common Effect Model**

Dependent Variable: IPM?				
Method: Pooled Least Squares				
Date: 04/28/18 Time: 08:32				
Sample: 2011 2016				
Included observations: 6				
Cross-sections included: 21				
Total pool (balanced) observations: 126				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOG(PP?)	4.742132	1.192158	3.977770	0.0001
LOG(PK?)	0.765756	1.541244	0.496843	0.6202
LOG(KEMISKINAN?)	-2.267085	1.046152	-2.167071	0.0322
LOG(BM?)	8.289889	0.851594	9.734558	0.0000
R-squared	-0.273627	Mean dependent var		60.54135
Adjusted R-squared	-0.304946	S.D. dependent var		4.773291
S.E. of regression	5.452733	Akaike info criterion		6.261342
Sum squared resid	3627.340	Schwarz criterion		6.351383
Log likelihood	-390.4645	Hannan-Quinn criter.		6.297923
Durbin-Watson stat	0.444219			

Sumber : Eviews 9, Diolah

## 4.2.2 Fixed Effect Model

**Tabel 4. 3 Hasil uji dengan Fixed Effect Model**

Dependent Variable: IPM?				
Method: Pooled Least Squares				
Date: 04/28/18 Time: 08:33				
Sample: 2011 2016				
Included observations: 6				
Cross-sections included: 21				
Total pool (balanced) observations: 126				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	49.24170	2.595077	18.97504	0.0000
LOG(PP?)	-1.213667	0.226776	-5.351820	0.0000
LOG(PK?)	1.844770	0.298637	6.177309	0.0000
LOG(KEMISKINAN?)	0.320279	0.658734	0.486204	0.6279
LOG(BM?)	1.773217	0.237092	7.479023	0.0000
Fixed Effects (Cross)				
_ALOR—C	-2.996031			
_BELU—C	-1.936780			
_ENDE—C	4.178247			
_FLORESTIMUR—C	-0.173604			
_KUPANG—C	0.360522			
_LEMBATA—C	0.413890			
_MANGGARAI—C	-1.770454			
_NGADA—C	4.308314			
_SIKKA—C	0.512354			
_SUMBABARAT—C	-0.101827			
_SUMBATIMUR—C	0.194863			
_TTS—C	-2.465138			
_TTU—C	-0.566004			
_KTKUPANG—C	17.39665			
_ROTENDAO—C	-2.465610			
_MANGGARAIBAR—C	-1.474975			
_NAGEKEO—C	2.687681			
_SBD—C	-1.234481			
_SUMTENG—C	-2.622394			
_MANGGARAITIM—C	-4.278603			
_SR—C	-7.966624			
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.983647	Mean dependent var	60.54135	
Adjusted R-squared	0.979761	S.D. dependent var	4.773291	
S.E. of regression	0.679068	Akaike info criterion	2.239474	
Sum squared resid	46.57451	Schwarz criterion	2.802228	
Log likelihood	-116.0869	Hannan-Quinn criter.	2.468103	
F-statistic	253.1319	Durbin-Watson stat	1.219264	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber : Eviews 9, Diolah

### 4.2.3 Random Effect Model

**Tabel 4. 4 Hasil uji dengan Random Effect Model**

Dependent Variable: IPM?				
Method: Pooled EGLS (Cross-section random effects)				
Date: 04/28/18 Time: 08:34				
Sample: 2011 2016				
Included observations: 6				
Cross-sections included: 21				
Total pool (balanced) observations: 126				
Swamy and Arora estimator of component variances				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	49.87843	2.634665	18.93160	0.0000
LOG(PP?)	-1.226315	0.225640	-5.434827	0.0000
LOG(PK?)	1.882223	0.296840	6.340864	0.0000
LOG(KEMISKINAN?)	0.137764	0.619127	0.222513	0.8243
LOG(BM?)	1.765568	0.236601	7.462223	0.0000
Random Effects (Cross)				
_ALOR—C	-2.994089			
_BELU—C	-1.948927			
_ENDE—C	4.208257			
_FLORESTIMUR--C	-0.301599			
_KUPANG--C	0.462147			
_LEMBATA--C	0.356128			
_MANGGARAI--C	-1.690316			
_NGADA—C	4.130542			
_SIKKA—C	0.481983			
_SUMBABARAT--C	-0.139115			
_SUMBATIMUR--C	0.277967			
_TTS—C	-2.255612			
_TTU—C	-0.519549			
_KTKUPANG--C	17.29452			
_ROTENDAO--C	-2.462364			
_MANGGARAIBAR--C	-1.452512			
_NAGEKEO--C	2.516193			
_SBD—C	-1.103931			
_SUMTENG--C	-2.712281			
_MANGGARAITIM--C	-4.160948			
_SR—C	-7.986494			
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			4.253790	0.9751
Idiosyncratic random			0.679068	0.0249
Weighted Statistics				
R-squared	0.671259	Mean dependent var		3.937255
Adjusted R-squared	0.660391	S.D. dependent var		1.191968
S.E. of regression	0.694631	Sum squared resid		58.38399
F-statistic	61.76764	Durbin-Watson stat		0.970743
Prob(F-statistic)	0.000000			

Unweighted Statistics			
R-squared	0.006748	Mean dependent var	60.54135
Sum squared resid	2828.819	Durbin-Watson stat	0.020035

Sumber : Eviews 9, Diolah

### 4.3 Pemilihan Model untuk Pengolahan Data

Dari ketiga model yaitu *Common Effect Model*, *Fixed Effect Model*, dan *Random Effect Model* sehingga pemilihan ini sangatlah penting karena bertujuan untuk menentukan mana model yang tepat, maka dilakukan uji analisis selanjutnya yaitu Uji Chow Test dan Uji Hausman Test yaitu sebagai berikut :

#### 4.3.1 Uji Chow Test

Uji Chow Test ini digunakan untuk memilih manakah model yang tepat, yaitu membandingkan antara model regresi *Common Effect Model* dengan *Fixed Effect Model*. Dengan Hipotesis sebagai berikut :

$H_0 = \text{Common Effect Model lebih baik dari pada Fixed Effect Model}$

$H_1 = \text{Fixed Effect Model lebih baik dari pada Common Effect Model}$

Uji F-statistik ini akan dianalisis dengan melihat nilai probabilitas F-Statistik. Apabila Probabilitas F-Statistik tidak signifikan atau  $\alpha > 5\%$  maka model yang tepat untuk dipilih adalah *Common Effect Model*. Begitu juga sebaliknya, jika nilai probabilitas F-Statistik signifikan atau  $\alpha < 5\%$  maka model yang dipilih yaitu *Fixed Effect Model*.

**Tabel 4. 5 Hasil Uji Chow Test**

Redundant Fixed Effects Tests			
Pool: FIXED			
Test cross-section fixed effects			
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	266.987333	(20,101)	0.0000
Cross-section Chi-square	502.305434	20	0.0000

Sumber : Eviews 9, Diolah

Dari hasil pengujian Uji Chow Test didapatkan hasil distribusi *Chi-Square* sebesar 502,305434 dengan nilai probabilitas sebesar 0,0000 atau  $\alpha < 5\%$ , yang berarti menolak  $H_0$  dan memilih  $H_1$  . Dengan hal tersebut menunjukkan bahwa model yang dipilih adalah *Fixed Effect Model*.

#### 4.3.2 Uji Hausman Test

Uji Hausman ini bertujuan untuk menentukan model manakah yang cocok untuk digunakan yaitu antara *Fixed Effect Model* atau *Random Effect Model*.

Dengan hipotesis sebagai berikut :

$H_0 = \text{Random Effect Model}$  lebih baik dari pada *Fixed Effect Model*

$H_1 = \text{Fixed Effect Model}$  lebih baik dari pada *Random Effect Model*

Uji Hausman Test akan melihat dengan menggunakan nilai Probabilitas Chi-square statistik. Apabila Probabilitas *Chi-Square* Statistik atau  $\alpha < 5\%$ , maka yang dipilih adalah *Fixed Effect Model*, namun jika sebaliknya jika nilai probabilitas *Chi-Square* statistik atau  $\alpha > 5\%$ , maka yang dipilih adalah *Random Effect Model*.



**Tabel 4. 6 Hasil Uji Hausman Test**

Correlated Random Effects - Hausman Test			
Pool: RANDOM			
Test cross-section random effects			
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	9.609647	4	0.0475

Sumber : Eviews 9, Diolah

Dilihat dari hasil yang didapatkan nilai *Chi-Square* yaitu sebesar 9,609647 dengan nilai probabilitas sebesar 0,0475 atau  $\alpha > 5\%$ , yang artinya menolak  $H_0$  dan memilih  $H_1$  . dikarenakan hal tersebut maka model yang tepat untuk dipilih yaitu *Fixed Effect Model*.

#### 4.4 Hasil Pengujian Statistik

Berdasarkan hasil spesifikasi model dengan menggunakan uji Chow Test dan Uji Hausman Test dapat dihasilkan untuk memilih *Random Effect Model*, dengan ini penulis melakukan analisis yang dapat mempengaruhi IPM di Provinsi DKI Jakarta. Yaitu hasil dari *Fixed Effect Model* adalah sebagai berikut :

**Tabel 4. 7 Fixed Effect Model**

Dependent Variable: IPM?				
Method: Pooled Least Squares				
Date: 04/28/18 Time: 08:33				
Sample: 2011 2016				
Included observations: 6				
Cross-sections included: 21				
Total pool (balanced) observations: 126				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	49.24170	2.595077	18.97504	0.0000
LOG(PP?)	-1.213667	0.226776	-5.351820	0.0000
LOG(PK?)	1.844770	0.298637	6.177309	0.0000
LOG(KEMISKINAN?)	0.320279	0.658734	0.486204	0.6279
LOG(BM?)	1.773217	0.237092	7.479023	0.0000
Fixed Effects (Cross)				
_ALOR—C	-2.996031			
_BELU—C	-1.936780			
_ENDE—C	4.178247			
_FLORESTIMUR—C	-0.173604			
_KUPANG—C	0.360522			
_LEMBATA—C	0.413890			
_MANGGARAI—C	-1.770454			
_NGADA—C	4.308314			
_SIKKA—C	0.512354			
_SUMBABARAT--C	-0.101827			
_SUMBATIMUR--C	0.194863			
_TTS—C	-2.465138			
_TTU—C	-0.566004			
_KTKUPANG--C	17.39665			
_ROTENDAO--C	-2.465610			
_MANGGARAIBAR--C	-1.474975			
_NAGEKEO—C	2.687681			
_SBD—C	-1.234481			
_SUMTENG--C	-2.622394			
_MANGGARAITIM--C	-4.278603			
_SR—C	-7.966624			
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.983647	Mean dependent var	60.54135	
Adjusted R-squared	0.979761	S.D. dependent var	4.773291	
S.E. of regression	0.679068	Akaike info criterion	2.239474	
Sum squared resid	46.57451	Schwarz criterion	2.802228	
Log likelihood	-116.0869	Hannan-Quinn criter.	2.468103	
F-statistic	253.1319	Durbin-Watson stat	1.219264	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber : Eviews 9, Diolah

#### 4.4.1 Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien Determinasi menunjukkan seberapa besar variasi variabel independen yang dianalisis dapat memberikan seberapa besar ukuran kedekatannya dengan garis regresi pada variabel dependen. Nilai  $R^2$  yang didapat yaitu sebesar 0,983647 yang artinya bahwa sebanyak 98,36% dimana variasi variabel independen yaitu pengeluaran pemerintah bidang kesehatan, pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, kemiskinan, dan belanja modal pemerintah. dapat dijelaskan kedekatan dengan garis regresi pada variabel dependen yaitu indeks pembangunan manusia. Sedangkan sisanya sebesar 1,64% disebabkan dan dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak dianalisis dalam penelitian ini.

#### 4.4.2 Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji ini berfungsi untuk mengetahui bagaimana variabel independen secara bersama-sama atau simultan dapat mempengaruhi variabel dependen. Dari hasil *fixed effect model* diperoleh nilai f-statistik sebesar 253,1319 dengan probabilitas sebesar 0,000000 ( $< \alpha = 5\%$ ). Sehingga dapat dikatakan bahwa seluruh variabel independen yaitu pengeluaran pemerintah bidang pendidikan (X1), pengeluaran pemerintah bidang kesehatan (X2), kemiskinan (X3), dan belanja modal (X4) secara bersama-sama serentak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu indeks pembangunan manusia (IPM).

#### 4.4.3 Uji Signifikansi (Uji t)

Dalam Uji Signifikansi ini adalah untuk masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen, apakah masing-masing variabel independen signifikan terhadap variabel dependen dapat dilihat dari uji signifikansi ini. Dengan signifikansi masing-masing variabel sebagai berikut:

1. Pengujian terhadap variabel pengeluaran pemerintah bidang pendidikan (X1)

$H_0 : \beta_i > \alpha$ , artinya pengeluaran pemerintah bidang pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.

$H_1 : \beta_i \leq \alpha$ , artinya pengeluaran pemerintah bidang pendidikan berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.

Dari hasil yang didapatkan *fixed effect model* (tabel 4.6) dengan taraf signifikansi 5% ( $\alpha = 5\%$ ), pengeluaran pemerintah bidang pendidikan mempunyai nilai probabilitas sebesar 0,0000 dengan t-hitung -5,351820, yang artinya menolak  $H_0$  dan menerima  $H_1$ . Dengan ini bisa disimpulkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah bidang pendidikan berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.

2. Pengujian terhadap variabel pengeluaran pemerintah bidang kesehatan (X2)

$H_0 : \beta_i > \alpha$ , artinya pengeluaran pemerintah bidang kesehatan tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.

$H_1 : \beta_i \leq \alpha$ , artinya pengeluaran pemerintah bidang kesehatan berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.

Dari hasil yang didapatkan *fixed effect model* (tabel 4.6) dengan taraf signifikansi 5% ( $\alpha = 5\%$ ), pengeluaran pemerintah bidang kesehatan mempunyai nilai probabilitas sebesar 0,0000 dengan t-hitung 6,177309, yang artinya menolak  $H_0$  dan menerima  $H_1$ . Bisa disimpulkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah bidang kesehatan berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.

### 3. Pengujian terhadap variabel kemiskinan

$H_0 : \beta_i > \alpha$ , artinya kemiskinan tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.

$H_1 : \beta_i \leq \alpha$ , artinya kemiskinan berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.

Dari hasil yang didapatkan *fixed effect model* (tabel 4.6) dengan taraf signifikansi 5% ( $\alpha = 5\%$ ), mempunyai nilai probabilitas sebesar 0,6279 dengan t-hitung 0,486204, yang artinya menolak  $H_1$  dan menerima  $H_0$ . Dengan ini bisa disimpulkan bahwa variabel kemiskinan tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.

### 4. Pengujian terhadap variabel belanja modal pemerintah

$H_0 : \beta_i > 0$ , artinya kemiskinan tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.

$H_1 : \beta_i \leq 0$ , artinya kemiskinan berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.

Dari hasil yang didapatkan *fixed effect model* (tabel 4.6) dengan taraf signifikansi 5% ( $\alpha = 5\%$ ), belanja modal pemerintah mempunyai nilai probabilitas sebesar 0,0000 dengan t-hitung 7,479023, yang artinya menolak  $H_0$  dan menerima  $H_1$ . Dengan ini bisa disimpulkan bahwa variabel belanja modal pemerintah berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.

#### **4.5 Interpretasi Hasil dan Pembahasan**

##### **4.5.1 Analisis pengaruh Pengeluaran Pemerintah bidang Pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia**

Hasil estimasi *fixed effect model* pengeluaran pemerintah bidang pendidikan menghasilkan pengaruh negatif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Dilihat dari koefisien yaitu sebesar -1,213667. yang artinya apabila pengeluaran pemerintah bidang pendidikan mengalami kenaikan 1% maka akan menurunkan hasil nilai indeks pembangunan manusia sebesar 1,213667. hasil ini tidak sesuai dengan hipotesis bahwa pengeluaran pemerintah bidang pendidikan berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia. Dalam kenyataannya masyarakat NTT masih belum mendapatkan kualitas pendidikan yang optimal dilihat dari BPS NTT untuk presentase penduduk laki-laki dan perempuan berumur 10 tahun ke atas menurut kemampuan membaca dan menulis dari tabel berikut :

**Tabel 4. 8 Kemampuan Penduduk laki-laki dan perempuan 10 tahun ke atas menurut kemampuan membaca dan menulis tahun 2015 dan 2016**

Wilayah	Laki-laki		Perempuan	
	2015	2016	2015	2016
Sumba Barat	84,57	86,74	82,92	86,2
Sumba Timur	95,75	93,64	91,37	90,05
Kupang	93,96	92,8	91,28	90,89
Timor Tengah Selatan	90	89,41	85,77	84,97
Timor Tengah Utara	91,34	92,77	89,63	91,62
Belu	90,22	90,57	88,85	87,99
Alor	96,71	98,08	94,81	94,22
Lembata	97,95	99,14	91,83	92,84
Flores Timur	95,72	97,1	90,62	92,72
Sikka	94,19	95,71	93,47	89,39
Ende	97,52	96,8	95,14	92,96
Ngada	98,37	98,61	96,9	98,39
Manggarai	96,69	96,27	93,72	93,84
Rote Ndao	93,21	91,94	92,67	92,66
Manggarai Barat	97,43	98,01	95,68	95,31
Sumba Tengah	92,86	93,74	88,1	87,33
Sumba Barat Daya	86,08	82,85	82,57	80,7
Nagekeo	96,28	95,89	94,75	94,21
Manggarai Timur	98,03	97,16	96,88	95,65
Sabu Raijua	88,61	89,79	89,18	87,54
Malaka	83,72	88,13	84,11	86,62
Kota Kupang	99,24	99,65	98,49	99,45

Sumber : BPS NTT

Dilihat dari tabel 4.8 bahwa perbandingan antara laki-laki dan perempuan tahun 2015 dan 2016, untuk laki-laki rata-rata setiap kabupaten mengalami kenaikan yang signifikan, salah satunya adalah kabupaten malaka sebesar 83,72 tahun 2015 menjadi 88,13 di tahun 2016. Untuk perempuan mengalami kenaikan pada kabupaten Sumba Barat dari 82,92 tahun 2015 menjadi 86,90 tahun 2016.

Dan juga dari angka partisipasi sekolah antara umur 7-12 tahun yang dapat dilihat dari tabel berikut :

**Tabel 4. 9 Presentase anak umur 7-12 tahun yang belum bersekolah, masih bersekolah, dan tidak bersekolah lagi tahun 2014-2016**

Wilayah	Tidak/Belum Pernah Bersekolah			Masih Bersekolah			Tidak Bersekolah Lagi		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Sumba Barat	1,5	15,6	1,77	98,35	84,4	98,23	0,16	0	-
Sumba Timur	0,14	9,21	1,31	98,69	89,97	98,69	1,17	0,82	-
Kupang	1,46	9,77	1,67	98,27	90,23	98	0,27	0	0,33
Timor Tengah Selatan	2,45	11,44	1,42	97,33	87,87	96,79	0,22	0,69	1,79
Timor Tengah Utara	0,65	12,07	0,64	99,14	87,64	98,98	0,21	0,29	0,38
Belu	1,31	8,37	1,78	96,94	90,64	97,05	1,75	0,99	1,17
Alor	2,1	16,14	1,69	97,67	83,58	98,31	0,23	0,28	-
Lembata	1,76	10,88	0,13	98,24	89,12	98,57	0	0	1,3
Flores Timur	0,77	17,65	1,06	98,93	82,35	98,94	0,3	0	-
Sikka	2,4	12,83	1,72	96,68	86,88	98,16	0,92	0,3	0,12
Ende	1	11,53	0,6	99	88,24	98,21	0	0,23	1,19
Ngada	1,09	14,54	0,06	98,91	85,46	99,41	0	0	0,54
Manggarai	0,27	13,7	0,78	99,4	86,3	99,22	0,33	0	-
Rote Ndao	0,87	10,04	1,49	98,82	89,81	98,36	0,3	0,15	0,15
Manggarai Barat	1,18	10,06	0,75	97,52	89,94	99,11	1,3	0	0,15
Sumba Tengah	1,44	14,62	1,43	98,56	85,38	98,57	0	0	-
Sumba Barat Daya	2,69	12,22	4,1	95,91	87,02	95,52	1,4	0,76	0,38
Nagekeo	0,41	8,22	1,6	98,92	91,78	97,73	0,67	0	0,67
Manggarai Timur	0,65	9,28	0,22	98,62	90,72	99,65	0,74	0	0,13
Sabu Raijua	2,29	8,21	0,33	96,91	91,79	99,67	0,8	0	-
Malaka	-	11,76	1,82	-	88,24	97,57	-	0	0,61
Kota Kupang	1,73	7,31	-	98,27	92,69	100	0	0	-

Sumber : BPS NTT

Dari tabel 4.9 tahun 2014 ke tahun 2015 rata-rata kabupaten yang ada di NTT mengalami penurunan minat masyarakat untuk mengenyam pendidikan, baik itu tidak/belum pernah bersekolah yang mengalami peningkatan yang signifikan, kemudian yang masih bersekolah, sampai tidak bersekolah lagi juga fluktuatif



ditahun 2015 ke tahun 2016. Hal ini menunjukkan bahwa apabila pengeluaran pemerintah bidang pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur meningkat belum tentu akan meningkatkan nilai indeks pembangunan manusia, dan juga karena dengan anggaran yang sudah dikeluarkan pemerintah untuk pendidikan tidak sedikit maka perlunya adanya pengawasan untuk menjaga aliran dana yang dialokasikan tepat sasaran untuk masyarakat NTT.

#### **4.5.2 Analisis pengaruh Pengeluaran Pemerintah bidang Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia**

Hasil estimasi *fixed effect model* pengeluaran pemerintah bidang kesehatan menghasilkan pengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Dilihat dari koefisien yaitu sebesar 1,844770, hal ini sesuai dengan hipotesis awal, apabila pengeluaran pemerintah bidang kesehatan naik sebesar 1% maka akan meningkatkan angka indeks pembangunan manusia sebesar 1,844770. Hasil ini sesuai dengan hipotesis awal. Hasil ini juga sama dengan penelitian yang dilakukan oleh nadia, istiqomah, et all (2012) dengan alasannya yaitu dengan adanya alokasi khusus untuk kesehatan yang berasal dari APBD diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama pembangunan manusia karena kesehatan berkaitan dengan produktivitas.

Dan juga penelitian oleh Jodi (2016) dengan alasan bahwa pendidikan dan kesehatan penduduk sangat menentukan kemampuan untuk menyerap dan mengelola sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baik dalam kaitannya dengan teknologi sampai kelembagaan yang penting bagi pertumbuhan ekonomi.

### **4.5.3 Analisis pengaruh Kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan**

#### **Manusia**

Hasil estimasi *fixed effect model* kemiskinan menghasilkan pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Dilihat dari koefisien kemiskinan yaitu sebesar 0,320279. Dengan hasil ini maka variabel kemiskinan tidak berpengaruh untuk menaikkan nilai indeks pembangunan manusia. Hasil analisis ini sesuai dengan penelitian septian, teguh, et all (2015).

Masyarakat NTT sampai sekarang ini masih memegang teguh tradisi nilai-nilai para leluhur mereka, hal itu bisa dilihat dari kebiasaan ritual mereka yang lebih memilih kebutuhan sekunder dari pada kebutuhan dasar, sandang pangan dan papan, ketika bercocok tanam masyarakat melakukan ritual adat terlebih dahulu, dengan itu membuat masyarakat hanya bercocok tanam pada musim hujan. Padahal untuk bercocok tanam zaman sekarang bisa dilakukan dengan teknologi yang diperuntukan untuk pertanian. Selain itu untuk acara penguburan orang yang sudah meninggal dapat menghabiskan anggaran yang tidak sedikit, mereka bisa menghabiskan kerbau, sapi, atau kuda yang padahal hewan-hewan tersebut mempunyai nilai jual atau untuk produktivitas setiap hari agar dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Realitas lain adalah masyarakat NTT pola hidup mereka yang kurang berhemat, mereka memaksakan diri untuk melakukan acara pesta atau acara lainnya yang hanya untuk kesenangan semata, mereka takut dinilai tidak mampu atau miskin dalam lingkungannya, dan banyak dari mereka yang meminjam uang untuk melaksanakan acara-acara tersebut. Di provinsi NTT sebetulnya banyak

sekali potensi pertanian seperti kopi, kakao, kemiri, cengkeh, dan lain-lain. Tetapi tidak lantas masyarakat bisa membuat kehidupan ekonomi menjadi lebih baik atau produktif, salah satu penyebabnya adalah dengan menyelenggarakan acara-acara tersebut diatas dan juga sumber daya manusia yang belum optimal.

Hal itu sesuai dalam mendefinisikan kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang ditengarai atau didalihkan karena faktor kondisi struktur atau tatanan kehidupan yang tak menguntungkan karena tatanan itu tak hanya menyebabkan kemiskinan akan tetapi juga melanggengkan kemiskinan di dalam masyarakat. Kemudian mendefinisikan kemiskinan kultural adalah suatu ketidakberdayaan, Keberdayaan itu sesungguhnya merupakan fungsi kebudayaan. Artinya, berdaya tidaknya seseorang dalam kehidupan bermasyarakat dalam kenyataannya akan banyak ditentukan dan dipengaruhi oleh determinan-determinan sosial-budayanya (seperti posisi, status, dan wawasan yang dipunyainya) (Wignjosoebroto,1995).

#### **4.5.4 Analisis pengaruh Belanja Modal Pemerintah terhadap Indeks Pembangunan Manusia**

Hasil estimasi *fixed effect model* belanja modal pemerintah menghasilkan pengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Dilihat dari koefisien tingkat pengangguran terbuka yaitu sebesar 1,773217, dengan arti apabila belanja modal pemerintah mengalami kenaikan sebesar 1% maka akan menaikkan indeks pembangunan manusia sebesar 1,773217, maka bisa dikatakan bahwa ada pengaruhnya alokasi belanja modal pemerintah dalam membantu menaikkan nilai indeks pembangunan manusia. Begitu juga dengan hasil penelitian

Mirza (2012) yang menjelaskan bahwa variabel belanja modal pemerintah berpengaruh signifikan dalam mempengaruhi indeks pembangunan manusia, dengan alasan belanja modal pemerintah sangat perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang didasarkan kepada pemikiran bahwa pendidikan merupakan salah satu upaya pembangunan yang mendasar.

#### 4.6 Koefisien Intersep

**Tabel 4. 10 Nilai Koefisien Intersep dan Intersep Sampel**

No	Kab/kota	Intersep	Koefisien	Konstanta
			49,2417	
1	Kab. Alor	-2,996031		46,245669
2	kab. Belu	-1,93678		47,30492
3	kab. Ende	4,178247		53,419947
4	kab. Flores Timur	-0,173604		49,068096
5	Kab. Kupang	0,360522		49,602222
6	kab. Lembata	0,41389		49,65559
7	Kab. Manggarai	-1,770454		47,47246
8	Kab. Ngada	4,308314		53,550014
9	Kab. Sikka	0,512354		49,754054
10	Kab. Sumba Barat	-0,101827		49,139873
11	Kab. Sumba Timur	0,194863		49,436563
12	Kab. Timor Tengah Selatan	-2,465138		46,776562
13	Kab. Timor Tengah Utara	-0,566004		48,675696
14	Kab. Rotendao	-2,46561		46,77609
15	Kab. Manggarai Barat	-1,474975		47,76625
16	Kab. Nagekeo	2,687681		51,929381
17	Kab. Sumba Barat Daya	-1,234481		49,007219
18	Kab. Sumba Tengah	-2,622394		46,619306
19	Kab. Maggarai Timur	-4,278603		44,963097
20	kab. Sabu Raijua	-7,966624		41,275076
21	Kota Kupang	17,39665		66,63835

Sumber : Hasil olahan eviews 9

Dari tabel 4.7 bahwa setelah dilakukan perhitungan menunjukkan nilai konstanta yang tertinggi adalah Kota Kupang dengan hasil 66,63835 kemudian disusul dengan Kabupaten Ngada yaitu sebesar 53,550014. Maka dengan variabel independen yang tersedia dapat meningkatkan nilai Indeks Pembangunan Manusia. Namun untuk Kabupaten Sabu Raijua menunjukkan nilai konstanta yang rendah yaitu sebesar 41,275076 hal itu menunjukkan dengan variabel independen yang ada belum bias meningkatkan nilai Indeks Pembangunan Manusia.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN IMPLIKASI**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan dari hasil yang didapatkan melalui analisis yang dilakukan dengan alat bantu eviews 9, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Variabel Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan (PP) berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.
2. Variabel Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan (PK) berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.
3. Variabel Kemiskinan berpengaruh tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
4. Variabel Belanja Modal berpengaruh Signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

#### **5.2 Implikasi**

1. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah bidang kesehatan dan belanja modal berpengaruh positif terhadap IPM, oleh karena itu pemerintah tetap menganggarkan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat yang mana terdapat dalam UU No.36 tahun 2009 bahwa anggaran kesehatan minimal 5 persen dari APBN diluar gaji. Sehingga dapat memberikan fasilitas kesehatan dan kebutuhan puskesmas disetiap daerah terpencil bisa terpenuhi, dan itu akan sesuai dengan indikator untuk meningkatkan IPM.

2. Disamping itu pemerintah juga harus berperan aktif dalam menanggulangi masalah pendidikan karena kualitas manusia bisa dilihat dari seberapa besar masyarakat yang melek huruf, dari berbagai sumber yang ada bahwa mutu pendidikan di provinsi NTT masih terbilang buruk, bila dilihat dari anak usia 7-12 tahun yang tidak lagi melanjutkan sekolah. Oleh karena itu pemerintah harus lebih giat lagi untuk mengalokasikan dananya untuk memberikan bantuan dana berupa bantuan operasional sekolah untuk setingkat SMP-SMA, dan beasiswa untuk masyarakat yang ingin melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. selain itu peran pemerintah juga sangat diperlukan untuk mengawasi aliran dana yang keluar agar tepat sasaran untuk pengalokasian dana pendidikan ke masyarakat NTT sehingga bisa menghindari tindakan yang bisa merugikan masyarakat. Dengan begitu pengeluaran pemerintah untuk bidang pendidikan bisa meningkatkan mutu pendidikan yang berkualitas dan masyarakat akan semakin cerdas serta dapat meningkatkan kualitas hidup mereka.
3. Dalam menanggulangi kemiskinan pemerintah perlu menerapkan kebijakan-kebijakan yang tepat dan tidak menyalahkan adat istiadat yang masyarakat pegang secara turun temurun, salah satunya dengan melakukan sosialisasi terlebih dahulu untuk mementingkan kebutuhan pokok dasar mereka. Selanjutnya masyarakat diberikan dana dan juga pelatihan berwirausaha dalam bentuk program dana desa mandiri untuk menjalankan usaha mikro kecil dan menengah, selain itu pemerintah bisa memberikan alokasi dana untuk memanfaatkan sumber daya alam yang

ada dengan menjadikan sebagai sektor pariwisata, karena provinsi NTT banyak dengan pantai yang masih alami dan berpotensi untuk dijadikan daerah pariwisata, dengan begitu masyarakat akan mendapatkan pendapatan lebih dan roda perekonomian akan berjalan dengan baik.

4. Selain itu karena NTT berbatasan langsung dengan negara timor leste maka perlunya dibangun akses atau infrastruktur yang memadai dengan begitu masyarakat dapat meningkatkan produktivitas mereka karena akses dari daerah satu ke daerah lainnya terhubung, sehingga akan menambah pendapatan mereka, dengan menambah pendapatan mereka otomatis perekonomian akan semakin berkembang.



## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik (2018). Indeks Pembangunan manusia. Diakses pada 14 Maret 2018. Dari <http://www.bps.go.id>
- \_\_\_\_\_ (2018). Kemiskinan. Diakses pada 14 Maret 2018. Dari <http://www.ntt.bps.go.id>
- Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Kementrian Keuangan. Database, diakses pada 19 maret 2018, dari [http://www.djpk.depkeu.go.id/?page\\_id=316](http://www.djpk.depkeu.go.id/?page_id=316).
- Esmara. (1986). *Sumber daya manusia, kesempatan kerja dan perkembangan ekonomi*. UI Press, Jakarta.
- Jodi J. (2016). “Memodelkan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi lampung”, Skripsi Sarjana (Tidak dipublikasikan), Fakultas Ekonomi. Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.
- Kompasiana (2017) Fenomena budaya sebagai penyebab kemiskinan di NTT. Diakses pada tanggal 29 maret 2018, dari, [https://www.kompasiana.com/yasintus/fenomena-budaya-sebagai-penyebab-kemiskinan-di-ntt\\_59223af71d23bd9a545e6fdd](https://www.kompasiana.com/yasintus/fenomena-budaya-sebagai-penyebab-kemiskinan-di-ntt_59223af71d23bd9a545e6fdd)
- Kuncoro ,Mudrajad. (1997). *Ekonomi pembangunan, teori masalah dan kebijakan*. UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Merang, et all. (2016). “Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Kutai Timur”. *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*. Vol.18 (2).
- Muhammad Deny F. (2018). “Analisis pengaruh pengeluaran pemerintah bidang kesehatan dan pendidikan, PDRB perkapita, Belanja Modal dalam mempengaruhi tingkat IPM di Provinsi Papua”. Skripsi Sarjana (tidak di publikasikan), Fakultas Ekonomi. Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.
- Miller, Herman P. (1971), “Rich Man, Poor Man ”, Thomas Y. Crowell Co.
- Mirza, Denni S. (2012), “Pengaruh kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan belanja modal terhadap indeks pembangunan manusia di jawa tengah tahun 2006-2009”, *Economics Development Analysis Journal*, Vol.1.
- Nadia , istiqomah, et all. (2012). “Anslisis faktor-faktor yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia di Indonesia periode 2008-2012”. *Ekuitas : Jurnal ekonomi dan keuangan*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2013, tentang tata cara pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara .

- Septian, teguh, et all. (2015). “Pengaruh PDRB, Belanja modal dan kemiskinan terhadap indeks pembangunan manusia (studi kasus : eks karesidenan Besuki)”. *Jurnal Ilmiah Universitas Negeri Jember*.
- Sugiarto, Abubakar, et all (2013). “Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah kabupaten/kota sektor kesehatan dan pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Aceh”. *Jurnal Ilmu Ekonomi*.
- Sukirno, S. (2000). *Makroekonomi modern : Perkembangan pemikiran dari klasik hingga Keynesian baru*. PT. Raja grafindo pustaka, Jakarta.
- Tjiptoherijanto, P. (1989). *Untaian pembangunan sumberdaya manusia*. BPFE UI. Jakarta.
- Todaro, Michael P. (1987). *Pembangunan ekonomi dunia ketiga*. BPFE UI, Jakarta.
- \_\_\_\_\_. (2006). *Pembangunan ekonomi*. Erlangga, Jakarta.
- The Word Bank (2017) Indonesia human development index rises but inequality remains, Jakarta. Dari <http://www.id.undp.org/content/indonesia/id/home/presscenter/pressreleases/2017/03/22/indonesia-s-human-development-index-rises-but-inequality-remains-.html>
- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 amandemen IV pasal 31 ayat 4, Bab pendidikan dan kebudayaan.
- Undang-undang peraturan kementrian keuangan nomor 36 tentang Anggaran kesehatan.
- Undang-undang peraturan kementrian keuangan nomor 18, pasal 1 angka 39 dan 40, tentang Anggaran pendapatan dan belanja negara.
- Undang-undang peraturan mentri keuangan nomor 101/PMK.02/2011, tentang klasifikasi anggaran.
- Widarjono, A. (2016) . *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya disertai penduan Eviews* (4<sup>th</sup> ed.),UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Wignjosoebroto, Sritomo. (1995). “Ergonomi, Studi gerak dan waktu. Teknik analisis untuk peningkatan produktivitas kerja, edisi pertama”, PT. Guna Widya. Jakarta.

## LAMPIRAN

### Lampiran 1. 1 Indeks pembangunan manusia kabupaten/kota provinsi NTT (persen)

Wilayah	Tahun					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Sumba Barat	59,33	59,98	60,55	60,9	61,36	61,85
Sumba Timur	60,43	60,89	61,44	62,04	62,54	63,22
Kupang	59,74	60,34	61,07	61,68	62,04	62,39
Timor Tengah Selatan	56,82	57,94	58,76	59,41	59,9	60,37
Timor Tengah Utara	57,87	59,04	59,56	60,41	60,54	61,04
Belu	56,63	57,58	59,12	59,72	60,54	61,04
Alor	56,01	56,47	57,52	58	58,5	58,99
Lembata	58,76	59,51	60,56	61,45	62,16	62,81
Flores Timur	58,15	58,93	59,8	60,42	61,24	61,9
Sikka	59,62	60,12	60,84	61,36	61,81	62,42
Ende	62,78	63,93	64,63	64,25	65,54	65,74
Ngada	62,8	63,57	64,43	64,64	65,1	65,61
Manggarai	58,02	58,92	59,49	60,08	60,87	61,67
Rote Ndao	55,78	56,56	57,28	57,82	60,04	60,63
Manggarai Barat	57,75	58,13	59,02	59,64	60,04	60,63
Sumba Tengah	56,21	56,66	57,25	57,6	57,91	58,52
Sumba Barat Daya	57,35	58,22	59,26	59,9	60,53	61,31
Nagekeo	61,05	61,6	62,24	62,71	63,33	63,93
Manggarai Timur	54,97	55,28	55,74	56,58	56,83	57,5
Sabu Raijua	49,16	50,3	51,55	52,51	53,28	54,16
Malaka	-	-	-	56,94	57,51	58,29
Kota Kupang	75,74	76,38	77,24	77,58	77,95	78,14

**Lampiran 1. 2 pengeluaran pemerintah bidang pendidikan kabupaten/kota provinsi NTT (Milyar Rupiah)**

Wilayah	Tahun					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Sumba Barat	75,603	43,353	114,858	128,989	145,253	151,652
Sumba Timur	202,889	218,65	258,771	265,114	279,792	264,319
Kupang	258,842	286,757	255,45	410,077	262,855	77,632
Timor Tengah Selatan	307,809	320,882	408,366	410,28	412,063	60,918
Timor Tengah Utara	183,005	201,825	228,792	247,11	257,822	35,252
Belu	231,241	316,685	273,508	255,032	224,924	30,86
Alor	188,489	216,41	231,701	259,048	262,957	248,955
Lembata	127,756	122,098	144,232	162,026	177,868	154,746
Flores Timur	224,675	277,521	283,638	311,357	331,816	54,538
Sikka	196,255	213,09	226,562	301,325	324,285	264,366
Ende	225,815	319,529	278,263	325,142	338,117	328,801
Ngada	123,279	109,93	166,067	181,166	192,552	28,583
Manggarai	184,461	225,815	241,034	251,03	286,36	48,959
Rote Ndao	123,181	124,297	198,021	146,767	154,879	163,443
Manggarai Barat	140,374	169,956	198,021	224,893	241,291	221,662
Sumba Tengah	76,256	86,333	101,414	102,228	105,637	24,995
Sumba Barat Daya	134,675	159,586	167,088	185,928	334,602	337,491
Nagekeo	104,417	144,312	169,523	188,687	199,237	183,207
Manggarai Timur	134,595	191,965	213,793	221,356	240,395	46,212
Sabu Raijua	93,822	126,207	85,006	94,223	116,289	21,157
Malaka	-	-	-	181,036	188,342	40,043
Kota Kupang	219,453	234,327	382,41	410,077	409,072	61,11

**Lampiran 1. 3 pengeluaran pemerintah bidang kesehatan kabupaten/kota provinsi NTT (Milyar Rupiah)**

Wilayah	Tahun					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Sumba Barat	38,406	24,624	48,198	47,824	59,924	112,657
Sumba Timur	57,812	67,6	88,442	96,928	127,221	173,357
Kupang	61,454	59,554	76,548	84,612	122,382	35,473
Timor Tengah Selatan	63,969	66,176	83,589	95,199	109,959	50,69
Timor Tengah Utara	49,665	55,711	68,324	68,418	79,237	24,742
Belu	73,524	80,957	100,385	106,377	112,106	61,831
Alor	49,344	64,455	58,985	74,903	87,252	105,885
Lembata	44,923	47,397	50,898	57,791	68,305	79,344
Flores Timur	56,36	64,304	91,899	100,233	127,95	36,424
Sikka	66,069	87,149	97,992	113,661	146,936	134,142
Ende	56,581	65,894	77,592	89,461	104,691	129,302
Ngada	34,761	45,304	56,847	64,271	74,072	26,215
Manggarai	66,238	74,551	91,051	101,847	114,579	55,881
Rote Ndao	33,159	39,807	45,355	54,244	65,526	72,224
Manggarai Barat	32,312	37,941	43,342	60,513	103,182	100,618
Sumba Tengah	19,048	24,23	24,819	37,494	40,222	24,368
Sumba Barat Daya	34,971	37,96	46,394	70,131	148,982	146,388
Nagekeo	29,831	31,824	37,419	57,295	72,04	103,651
Manggarai Timur	29,026	40,567	42,472	52,628	69,535	22,196
Sabu Raijua	30,227	21,176	24,514	32,426	42,075	6,683
Malaka	-	-	-	38,28	40,536	24,877
Kota Kupang	43,734	62,697	77,125	84,612	95,702	22,653

**Lampiran 1. 4 Kemiskinan kabupaten/kota provinsi NTT (Ribu Jiwa)**

Wilayah	Tahun					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Sumba Barat	34,08	34,6	34,2	33,47	37,35	36,21
Sumba Timur	71,54	72,5	68,8	67,4	77,95	78,19
Kupang	61,02	61,9	101,5	64,96	80,98	82,57
Timor Tengah Selatan	122,32	124	126	122,49	144,01	138,43
Timor Tengah Utara	50,49	51,2	51,8	50,72	61,96	59,34
Belu	52,81	53,5	29,3	54,46	34,75	33,13
Alor	38,91	39,4	39,6	38,72	45,83	44,95
Lembata	30,51	30,9	29,6	29,07	35,93	35,18
Flores Timur	21,63	21,9	19,6	19,21	24,02	25,65
Sikka	38,91	39,4	39,2	38,28	44,64	45,14
Ende	54,5	55,3	56,2	54,74	62,23	64,64
Ngada	16,61	16,8	16,9	16,47	19,85	19,76
Manggarai	64,78	65,7	65,2	63,86	74,01	72,65
Rote Ndao	38,23	38,7	39,1	38,55	45,01	45,06
Manggarai Barat	43,83	44,4	44,1	42,5	50,98	49,55
Sumba Tengah	20,56	20,9	21,3	21,26	24,69	25,34
Sumba Barat Daya	82,16	83,3	82,7	81,01	96,54	99,26
Nagekeo	16,03	16,2	16,5	16,64	20	19,18
Manggarai Timur	63,53	64,4	66,1	64,72	77,67	76,37
Sabu Raijua	29,54	29,9	25,3	24,8	28,43	28,58
Malaka	-	-	-	33,45	32,28	31,14
Kota Kupang	34,47	35	33,8	33,3	39,73	39,59

**Lampiran 1. 5 Belanja modal kabupaten/kota provinsi NTT (Milyar Rupiah)**

Wilayah	Tahun					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Sumba Barat	98,356	106,499	126,145	152,637	172,451	235,803
Sumba Timur	115,875	137,096	186,44	194,952	207,714	308,703
Kupang	160,471	177,558	130,827	193,903	188,587	452,168
Timor Tengah Selatan	169,241	188,055	222,475	209,094	157,07	244,781
Timor Tengah Utara	105,248	134,101	135,699	138,752	145,297	194,518
Belu	75,152	154,793	121,049	125,694	141,087	222,977
Alor	97,997	118,072	117,958	186,201	177,259	260,645
Lembata	78,593	100,172	150,786	137,889	176,375	219,857
Flores Timur	79,287	131,85	117,029	119,597	153,846	201,9
Sikka	52,384	90,274	94,523	136,219	99,195	199,056
Ende	63,688	162,847	112,447	99,111	141,172	343,094
Ngada	119,628	92,261	91,795	109,669	132,267	231,203
Manggarai	69,858	162,387	190,68	232,817	212,766	322,531
Rote Ndao	84,031	73,374	108,638	119,727	142,286	200,868
Manggarai Barat	114,457	141,829	152,708	227,732	202,173	258,562
Sumba Tengah	128,304	141,829	107,74	146,334	212,766	184,855
Sumba Barat Daya	112,928	110,629	117,826	122,709	161,458	198,198
Nagekeo	87,292	101,097	98,322	127,434	153,502	250,848
Manggarai Timur	166,234	178	154,497	178,298	162,172	209,253
Sabu Raijua	114,424	141,472	130,429	143,262	240,324	238,411
Malaka	-	-	-	36,564	172,021	262,613
Kota Kupang	80,706	67,599	111,232	139,093	172,28	153,658